



Katalog BPS: 2102031



PERUMAHAN PENDUDUK INDONESIA

Hasil Sensus Penduduk 2010



BADAN PUSAT STATISTIK

PERUMAHAN PENDUDUK INDONESIA

Hasil Sensus Penduduk 2010

<http://www.bp-2010>

PERUMAHAN PENDUDUK INDONESIA

HASIL SENSUS PENDUDUK 2010

ISBN: 978-979-064-309-3

No. Publikasi: 04000.1104

Katalog BPS: 2102031

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: viii + 69 halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Demografi

Penulis:

Ahmad Muhammad Saleh

Joko Widiarto

Penyunting:

S. Happy Hardjo

Gantjang Amanullah

Nona Iriana

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak oleh:

CV. Marsadito Intan Prima

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Data hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010) mengandung banyak informasi yang relevan dan perlu bagi bangsa maupun dunia internasional. Bahkan dunia ilmu pengetahuan akan berkembang pesat karena data dan informasi statistik ini akan menjadi temuan-temuan baru.

Gambaran ringkas dari hasil SP2010 mengenai berbagai hal disajikan dalam beberapa buku secara seri. Buku "**Perumahan Penduduk Indonesia**" ini adalah salah satu seri yang menggambarkan situasi dan perkembangan indikator kependudukan menyangkut perumahan.

Data dan informasi yang bisa dimuat dalam buku ini hanya bersifat ringkas, menyangkut isu-isu pokok saja. Meskipun demikian, data dan informasi tersebut akan cukup menggugah pembaca untuk mengkaji lebih jauh, lebih dalam, dan lebih kompleks terkait data dan informasi perumahan.

Data dan informasi lain yang dapat diakses oleh publik tersedia pada website BPS dengan alamat: <http://sp2010.bps.go.id>. Dengan penyajian online itu, akan lebih banyak data dan penjelasan yang dapat diperoleh serta lebih mudah mengaksesnya dari mana saja dan kapan saja.

Data hasil SP2010 merupakan aset bangsa Indonesia yang sangat terbuka untuk dieksplorasi oleh para pakar dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Dari data dan informasi tersebut bisa diperhitungkan berbagai aspek sosial ekonomi, seperti segmentasi pasar, sumberdaya manusia, kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan), serta potensi ketahanan nasional atau wilayah.

Terakhir, kami selaku penghasil data dan informasi statistik mengajak semua pihak memanfaatkan secara optimal data dan informasi statistik hasil SP2010 sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam negeri maupun di dunia internasional.

Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kasih, menyertai statistik Indonesia sekarang dan selama-lamanya.

Jakarta, Oktober 2011
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia

Dr. Rusman Heriawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Sistematika Penulisan	2
2 METODOLOGI	3
2.1 Sumber Data	3
2.2 Definisi Operasional	4
2.3 Keterbatasan Data	8
3 PERUMAHAN PENDUDUK INDONESIA	9
3.1 Kepemilikan Bangunan	9
3.1.1 Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	9
3.1.2 Bukti Kepemilikan	11
3.2 Jenis dan Luas Lantai	12
3.2.1 Jenis Lantai Terluas	12
3.2.2 Luas Lantai	13
3.3 Sumber Penerangan Utama	14
3.4 Sumber Air Minum	16
3.5 Sanitasi	17
3.5.1 Fasilitas Tempat Buang Air Besar	17
3.5.2 Tempat Pembuangan Akhir Tinja	17
3.6 Bahan Bakar untuk Memasak Sehari-hari	19
3.7 Teknologi Informasi dan Komunikasi	20
4 PENUTUP	23
DAFTAR PUSTAKA	25
LAMPIRAN	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Kuesioner, 2010.....	3
Tabel 2	Keterbandingan Informasi Perumahan Menurut Jenis Kuesioner, 2010	4
Tabel 3	Indikator Perumahan Menurut Variabel Perumahan yang Tidak Ada di SP2010.....	8
Tabel 4	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal dan Daerah Tempat Tinggal, 2010	9
Tabel 5	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas dan Daerah Tempat Tinggal, 2010.....	13
Tabel 6	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama dan Daerah Tempat Tinggal, 2010	14
Tabel 7	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum dan Daerah Tempat Tinggal, 2010.....	16
Tabel 8	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Daerah Tempat Tinggal, 2010	17
Tabel 9	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Jamban Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Daerah Tempat Tinggal, 2010	17
Tabel 10	Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe daerah dan Jenis Bahan Bakar yang Digunakan untuk Memasak, 2010.....	19
Tabel 11	Persentase Rumah Tangga Menurut Penguasaan Telepon dan Tipe Daerah, 2010.....	20
Tabel 12	Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Internet selama 3 Bulan Terakhir dan Tipe Daerah, 2010.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri Menurut Provinsi, 2010.....	10
Gambar 2	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Bangunan Milik Sendiri Menurut Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal dan Daerah Tempat Tinggal, 2010	11
Gambar 3	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Bangunan Milik Sendiri Menurut Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal dan Daerah Tempat Tinggal, 2010	12
Gambar 4	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita dan Daerah Tempat Tinggal, 2010.....	13
Gambar 5	Persentase Rumah Tangga yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik Menurut Provinsi, 2010.....	15
Gambar 6	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Jamban dan Tempat Akhir Pembuangan Tinja Septik Menurut Provinsi, 2010.	18

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel L1.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal (Perkotaan), SP2010	29
Tabel L1.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal (Perdesaan), SP2010.....	30
Tabel L1.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal (Perkotaan + Perdesaan), SP2010.....	31
Tabel L2.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Bukti Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal (Perkotaan), SP2010	32
Tabel L2.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Bukti Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal (Perdesaan), SP2010.....	33
Tabel L2.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Bukti Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal (Perkotaan + Perdesaan), SP2010.....	34
Tabel L3.1	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Memiliki Bukti Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Menurut Provinsi dan Jenis Bukti Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal (Perkotaan), SP2010	35
Tabel L3.2	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Memiliki Bukti Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Menurut Provinsi dan Jenis Bukti Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal (perdesaan), SP2010	36
Tabel L3.3	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Memiliki Bukti Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Menurut Provinsi dan Jenis Bukti Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal (Perkotaan + Perdesaan), SP2010	37
Tabel L4.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal, (Perkotaan), SP2010	38
Tabel L4.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal, (Perdesaan), SP2010.....	39
Tabel L4.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal, (Perkotaan + Perdesaan), SP2010.....	40
Tabel L5.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Luas Lantai Per Kapita (m ² /org) Bangunan Tempat Tinggal (Perkotaan), SP2010	41
Tabel L5.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Luas Lantai Per Kapita (m ² /org) Bangunan Tempat Tinggal (Perdesaan), SP2010.....	42
Tabel L5.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Luas Lantai Per Kapita (m ² /org) Bangunan Tempat Tinggal (Perkotaan + Perdesaan), SP2010.....	43
Tabel L6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Penerangan Utama Bangunan Tempat Tinggal (Perkotaan), SP2010	44
Tabel L6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Penerangan Utama Bangunan Tempat Tinggal (Perdesaan), SP2010.....	45
Tabel L6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Penerangan Utama Bangunan Tempat Tinggal (Perkotaan + Perdesaan), SP2010.....	46
Tabel L7.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Utama Air Minum (Perkotaan), SP2010	47

Tabel L7.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Utama Air Minum (Perdesaan), SP2010	49
Tabel L7.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Utama Air Minum (Perkotaan + Perdesaan), SP2010	51
Tabel L8.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Fasilitas Buang Air Besar (Perkotaan), SP2010	53
Tabel L8.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Fasilitas Buang Air Besar (Perdesaan), SP2010	54
Tabel L8.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Fasilitas Buang Air Besar (Perkotaan + Perdesaan), SP2010	55
Tabel L9.1	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Jamban (Sendiri, Bersama, Umum) Menurut Provinsi dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja (Perkotaan), SP2010	56
Tabel L9.2	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Jamban (Sendiri, Bersama, Umum) Menurut Provinsi dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja (Perdesaan), SP2010	57
Tabel L9.3	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Jamban (Sendiri, Bersama, Umum) Menurut Provinsi dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja (Perkotaan + Perdesaan), SP2010	58
Tabel L10.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Bahan Bakar Masak Utama Sehari-hari (Perkotaan), SP2010	59
Tabel L10.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Bahan Bakar Masak Utama Sehari-hari (Perdesaan), SP2010	60
Tabel L10.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Bahan Bakar Masak Utama Sehari-hari (Perkotaan + Perdesaan), SP2010	61
Tabel L11.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penguasaan Telepon (Perkotaan), SP2010	62
Tabel L11.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penguasaan Telepon (Perdesaan), SP2010	63
Tabel L11.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penguasaan Telepon (Perkotaan + Perdesaan), SP2010	64
Tabel L12.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan ART yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir (Perkotaan), SP2010	65
Tabel L12.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan ART yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir (Perdesaan), SP2010	66
Tabel L12.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan ART yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir (Perkotaan + Perdesaan), SP2010	67

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sensus penduduk adalah seluruh kegiatan sistematis dari proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan penyajian data dari sejumlah karakteristik demografi, ekonomi dan sosial penduduk pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah. Sensus penduduk di Indonesia biasa disebut pencacahan penduduk, merupakan pendataan penduduk yang dilakukan terhadap seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia. Data yang biasa dikumpulkan antara lain: nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, kewarganegaraan, pekerjaan, dan tempat lahir.

Undang-undang No.16 tahun 1997 tentang Statistik pasal 8 ayat 1 mengamanatkan bahwa sensus penduduk di Indonesia dilaksanakan sekali dalam setiap 10 tahun. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nation Statistical and Development* merekomendasikan setiap negara agar dapat melakukan Sensus Penduduk dan Perumahan. Pada tahun 2010 Indonesia menyelenggarakan sensus penduduk. Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010) merupakan sensus penduduk yang ke enam sejak Indonesia merdeka. Sebelumnya sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak lima kali, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000.

Kegiatan Sensus Penduduk 2010 dilaksanakan di seluruh wilayah geografis Indonesia yang meliputi 33 provinsi, 497 kabupaten/kota, 6.651 kecamatan dan 77.126 desa/kelurahan. Disamping itu dilakukan juga pendataan terhadap duta besar perwakilan RI dan keluarganya di luar negeri.

Publikasi buku Perumahan Penduduk Indonesia ini dimaksud untuk memberikan gambaran secara ringkas hasil SP2010 mengenai karakteristik Perumahan Indonesia yang meliputi status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal, bukti kepemilikan tanah tempat tinggal, jenis lantai, luas lantai, sumber penerangan, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, tempat pembuangan akhir tinja, bahan bakar untuk memasak sehari-hari, penguasaan telepon, dan akses internet selama 3 bulan terakhir. Buku ini merupakan salah satu buku dari 9 publikasi buku ringkas yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).

1.2 Tujuan

Tujuan Sensus Penduduk 2010 adalah:

- 1) Mengumpulkan dan menyajikan data dasar kependudukan sampai wilayah administrasi terkecil.
- 2) Membentuk Kerangka Sampel Induk (KSI) untuk kepentingan survei-survei lain yang dilakukan dengan pendekatan rumah tangga.
- 3) Memperkirakan berbagai parameter kependudukan sampai wilayah administrasi tertentu.

- 4) Mengumpulkan informasi kependudukan yang dapat digunakan/dimanfaatkan untuk penyusunan basis data kependudukan.
- 5) Mengumpulkan informasi perumahan yang dapat digunakan/dimanfaatkan untuk penyusunan basis data perumahan.

1.3 Sistematika Penulisan

Penyajian pada buku ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, dan sistematika penulisan. Bab kedua menjelaskan metodologi yang terdiri dari sumber data, definisi operasional, dan keterbatasan data. Bab ketiga menguraikan gambaran umum mengenai perumahan di Indonesia hasil SP2010. Bab keempat berisi penutup dan diakhiri dengan lampiran tabel pendukung.

<http://www.bps.go.id>

2. METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Dalam penjelasan di muka, data yang disajikan berasal dari hasil SP2010 yang dilaksanakan bulan Mei 2010. Metodologi yang digunakan dalam pengumpulan data penduduk dan perumahan dirancang sesuai dengan tempat tinggal rumah tangga/penduduk seperti bertempat tinggal di rumah biasa, apartemen, rumah toko, rumah susun, atau rumah perahu. Penduduk yang tidak memiliki tempat tinggal (tuna wisma) juga didata dalam sensus. Untuk menghasilkan data yang akurat dan lengkap seluruh penduduk Indonesia yang bertempat tinggal berbeda-beda tersebut, maka pendataan penduduk dalam SP2010 menggunakan kuesioner yang berbeda, yaitu:

1. Kuesioner SP2010-C1 (selanjutnya disebut C1), digunakan untuk pencacahan lengkap rumah tangga biasa dan khusus.
2. Kuesioner SP2010-C2 (selanjutnya disebut C2), dibedakan C2 umum dan C2 eksklusif/apartemen. C2 umum digunakan untuk pencacahan rumah tangga yang tinggal di lokasi khusus, masyarakat terpencil, penghuni perahu, dan untuk anggota Korps Diplomatik RI beserta anggota rumah tangganya di luar negeri. C2 eksklusif/apartemen digunakan untuk pencacahan rumah tangga yang tinggal di apartemen tertentu yang akses pencacahannya sulit.
3. Kuesioner SP2010-L2 (selanjutnya di sebut L2), digunakan untuk mencacah penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap seperti tuna wisma, penghuni penjara, barak militer, rumah sakit jiwa, awak kapal berbendera Indonesia, pengungsi, dan suku terasing.

Sensus mencatat sebanyak 61.163.538 rumah tangga. Sebagian besar rumah tangga tersebut didata dengan kuesioner C1 (99,91 persen) sedangkan sisanya didata dengan kuesioner C2 dan L2. Jumlah rumah tangga menurut jenis kuesioner dicantumkan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Kuesioner, 2010

Jenis Kuesioner	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
C1	61 105 458	99,91
C2 Umum, C2 Eksklusif/Apartemen, L2	58 080	0,09
Jumlah	61 163 538	100,00

Informasi perumahan di kuesioner C1 lebih banyak dibanding kuesioner C2 Umum dan C2 Eksklusif/Apartemen. Pada kuesioner L2 tidak dikumpulkan informasi perumahan. Karena informasi perumahan berbeda dalam setiap kuesioner, maka penyajian data akan dilengkapi dengan keterangan jenis kuesioner tersebut.

Pada Tabel 2 dijelaskan informasi perumahan menurut jenis kuesioner C1, C2 Umum, dan C2 Eksklusif/Apartemen.

Tabel 2
Keterbandingan Informasi Perumahan Menurut Jenis Kuesioner, 2010

Jenis Kuesioner	Informasi Perumahan yang Dicakup
(1)	(2)
C1	jenis lantai terluas, luas lantai tempat tinggal, sumber penerangan utama rumah tangga, bahan bakar memasak, sumber utama air minum, fasilitas tempat buang air besar, tempat akhir pembuangan tinja, penguasaan telepon, akses internet dalam 3 bulan terakhir, status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal, serta bukti kepemilikan tanah tempat tinggal dan jenis buktinya
C2 Umum	luas lantai tempat tinggal, sumber penerangan utama rumah tangga, sumber utama air minum, fasilitas tempat buang air besar
C2 Eksklusif/ Apartemen	Luas lantai, akses internet dalam 3 bulan terakhir, status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal, serta bukti kepemilikan tanah tempat tinggal dan jenis buktinya Catatan: Jenis lantai terluas, sumber penerangan, sumber air minum, dan penguasaan telepon tidak dicakup di kuesioner C2 Eksklusif/ Apartemen. Namun, karena rumah tangga yang dicacah dengan kuesioner C2 Eksklusif/Apartemen diasumsikan memiliki karakteristik perumahan yang lebih baik, maka informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> Jenis lantai terluasnya diasumsikan keramik/marmer/granit Sumber penerangannya diasumsikan listrik PLN dengan meteran Sumber utama air minumannya ledeng sampai rumah Penguasaan teleponnya diasumsikan menguasai telepon kabel dan seluler

2.2 Definisi Operasional

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

Bangunan fisik adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap, baik tetap maupun sementara, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan dapur, kamar mandi, garasi, dan lainnya yang terpisah dari bangunan induk dianggap bagian dari bangunan induk tersebut (satu bangunan) jika terletak dalam satu pekarangan. Bangunan yang luas lantainya kurang dari 10 m² dan tidak digunakan untuk tempat tinggal dianggap bukan bangunan fisik.

Contoh Bangunan Fisik: rumah, hotel, toko, pabrik, sekolah, masjid, kuil, gereja, gedung kantor, balai pertemuan, dan sebagainya.

Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri dan dalam satu kesatuan penggunaan.

Milik sendiri adalah jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga (KRT) atau salah seorang anggota rumah tangga (ART). Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap milik sendiri.

Kontrak adalah jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/ART dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus dimuka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

Sewa adalah jika tempat tinggal tersebut disewa oleh KRT atau salah seseorang ART dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

Status kepemilikan tempat tinggal lainnya adalah jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat, rumah dinas, termasuk didalamnya rumah bebas sewa.

Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART adalah SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini salah seorang ART.

Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama ART adalah SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini seseorang yang bukan termasuk ART.

Sertifikat lain adalah Tanda bukti yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini salah seorang ART. Sertifikat ini bisa berupa:

- SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan)
- SHP (Sertifikat Hak Pakai)
- SHM-SRS (Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun)

Lainnya adalah salah satu tanda bukti kepemilikan tanah oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT/Notaris) seperti girik, akte jual beli.

Girik adalah surat tanda bukti kepemilikan pemilik tanah yang biasa disebut juga salinan *Letter C* yang dikeluarkan Kepala Desa/Kelurahan, baik yang sudah dipecah maupun induknya. Akte Jual Beli adalah Akte perjanjian jual beli yang diterbitkan oleh Notaris PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), baik yang sudah atas nama art maupun orang lain. Termasuk di Lainnya adalah SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha).

Lantai adalah alas/dasar suatu bangunan tempat tinggal responden. Jenis lantai terdiri dari keramik/marmer/granit, ubin/tegel/teraso, semen/bata merah, kayu/papan, bambu, tanah. dan lainnya. Lantai ubin yang dilapisi karpet atau vinil tetap dikategorikan ubin. Jika lantai bangunan tempat tinggal lebih dari satu jenis, pilih yang terluas.

Luas Lantai adalah jumlah luas lantai dari setiap bagian bangunan (sebatas atap) yang ditempati (dihuni) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh rumah tangga, termasuk teras, garasi, tempat mencuci, WC, gudang, lantai setiap tingkat untuk bangunan bertingkat dalam satu bangunan sensus.

Luas lantai tempat tinggal rumah tangga tidak termasuk ruangan khusus untuk usaha, warung, restoran, toko, salon, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), lumbung padi dan lain-lain. Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati.

Catatan:

1. Jika satu bangunan sensus ditempati oleh beberapa rumah tangga, maka luas lantai ruangan yang dipakai bersama, luas lantainya dibagi dengan banyaknya rumah tangga yang menggunakannya.
2. Jika ada 2 bangunan terpisah yang ditempati oleh satu rumah tangga dan masih dalam satu blok sensus, maka luas lantainya dihitung seluruhnya.
3. Taman yang di dalam rumah, atau yang di samping rumah namun masih di bawah atap, semuanya ditambahkan sebagai luas lantai.

Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN, termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya.

Listrik PLN meteran adalah sumber penerangan yang diproduksi PLN (Perusahaan Listrik Negara) dengan cara berlangganan dan ada meteran sebagai pengukur jumlah pemakaian listrik di rumah tangga. Termasuk dalam kategori ini adalah rumah tangga yang menggunakan satu meteran secara bersama-sama. Dalam SP2010, rumah tangga yang tinggal di apartemen dianggap memiliki sumber penerangan listrik PLN meteran.

Listrik PLN tanpa meteran adalah sumber penerangan yang diproduksi PLN (Perusahaan Listrik Negara) tetapi tidak ada meteran yang terpasang di rumah. Termasuk dalam kategori ini adalah jika suatu rumah tangga mengambil listrik secara ilegal.

Bukan listrik adalah jika rumah tangga menggunakan sumber penerangan bukan listrik, seperti lampu gas elpiji (LPG) dan biogas yang dibangkitkan sendiri maupun berkelompok, sumber penerangan dari minyak tanah (petromak/lampu tekan, aladin, teplok, sentir, pelita, dan sejenisnya), dan lainnya (lampu karbit, lilin, biji jarak dan kemiri).

Air kemasan adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (330 ml, 600 ml, 1 liter, 12 liter atau 19 liter) dan kemasan gelas, seperti antara lain air kemasan merk Aqua, VIT, Airess, Moya, 2 Tang, MQ, dan termasuk air minum isi ulang.

Ledeng sampai rumah adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air sampai di rumah responden. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola pemerintah maupun swasta. Air yang diproduksi melalui proses

penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air ditempat tertentu/umum. Rumah tangga yang mendapatkan air ledeng dengan cara ini baik dengan cara membeli atau tidak termasuk dalam kategori ini. Ledeng eceran adalah rumah tangga yang minum dari air ledeng yang diperoleh dari pedagang air keliling dianggap mempunyai sumber air minum ledeng eceran.

Pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, kincir angin, atau sumur artesis (sumur pantek).

Sumur adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali. Cara pengambilannya dengan menggunakan gayung atau ember, baik dengan maupun tanpa katrol. Air sumur dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu air sumur terlindung dan tidak terlindung.

Sumur terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah bila lingkaran sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur. Bila suatu rumah tangga menggunakan sumur terlindung sebagai sumber air minum, namun dalam mengambil (menaikkan) airnya, rumah tangga itu menggunakan pompa (pompa tangan atau pompa listrik), maka sumber air rumah tangga tersebut tetap dikategorikan sumur terlindung.

Sumur tak terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah bila lingkaran sumur tersebut tak dilindungi oleh tembok dan lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.

Mata air adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Rumah tangga yang minum air yang berasal dari mata air atau air hujan yang ditampung dan dialirkan ke rumah dengan menggunakan pipa pralon/pipa ledeng tanpa proses penjernihan maka sumber air minumnya tetap mata air atau air hujan.

Mata air terlindung adalah bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Mata air tak terlindung adalah bila mata air tersebut tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Air sungai adalah air yang bersumber dari sungai.

Air hujan adalah air yang diperoleh dengan cara menampung air hujan.

Sumber air lainnya adalah jenis sumber air yang tidak termasuk kategori tersebut di atas, seperti air waduk/danau, air laut, dan kolam.

Fasilitas tempat buang air besar/jamban sendiri adalah jamban/kakus yang digunakan khusus oleh rumah tangga responden, walaupun kadang-kadang ada yang menumpang.

Fasilitas buang air besar/jamban bersama adalah jamban/kakus yang digunakan beberapa rumah tangga tertentu.

Fasilitas tempat buang air besar/jamban umum adalah jamban/kakus yang penggunaannya tidak terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapapun dapat menggunakannya.

Tidak ada fasilitas tempat buang air besar/jamban adalah tidak ada fasilitas jamban/kakus, misalnya lahan terbuka yang bisa digunakan untuk buang air besar (tanah lapang/kebun/halaman/semak belukar), pantai, sungai, danau, kolam, dan lainnya.

Tangki septik adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton, baik yang mempunyai bak resapan maupun tidak.

Tempat pembuangan tanpa tangki septik adalah tempat pembuangan tanpa tangki septik seperti cubluk, cemplung.

Tidak punya tempat pembuangan adalah tempat pembuangan akhir seperti kolam, sawah, sungai, danau, laut, lubang tanah, pantai, tanah lapang, kebun.

Penguasaan telepon adalah penguasaan rumah tangga atas telepon kabel (*Public Switched Telephone Network, flexi home*). Tanpa kabel (telepon seluler (HP)/*Mobile Phone*).

Internet (*Interconnected Network*) adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Komputer yang digunakan untuk mengakses internet mencakup komputer yang ada di rumah (yang dikuasai oleh rumah tangga) dan di luar rumah (warnet, kantor, sekolah, rumah saudara, rumah teman, dan lain-lain).

Akses Internet adalah mengoperasikan media internet secara aktif, termasuk yang mengakses internet dengan menggunakan HP.

Bahan bakar adalah jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak seperti listrik, gas, minyak tanah, arang, kayu, lainnya.

2.3 Keterbatasan Data

Dalam sensus seluruh penduduk di wilayah Indonesia dicakup dalam pencacahan termasuk korps diplomatik yang berada di luar negeri. Namun, dalam sensus tidak dapat mengumpulkan jenis data yang banyak karena memerlukan sumber daya yang sangat besar. Akibatnya data perumahan SP2010 tidak selengkap data perumahan yang ada di Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans), serta belum dapat digunakan untuk menghitung beberapa indikator perumahan. Sebagai contoh, indikator perumahan yang tidak bisa dihitung melalui data SP2010 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Indikator Perumahan Menurut Variabel Perumahan yang Tidak Ada di SP2010

Indikator Perumahan	Variabel yang Dibutuhkan untuk Penghitungan Indikator tapi Tidak Ada di SP2010
(1)	(2)
Air bersih/layak minum	Jarak ke penampungan tinja/kotoran terdekat
Rumah layak huni	Jenis atap, jenis dinding
Sanitasi layak	Jenis kloset (leher angsa)

3. PERUMAHAN PENDUDUK INDONESIA

Idealnya satu bangunan tempat tinggal (rumah) dihuni satu rumah tangga. Dalam kenyataannya, terdapat satu bangunan tempat tinggal yang dihuni dua atau lebih rumah tangga. Sementara itu, pencacahan SP2010 menggunakan pendekatan rumah tangga. Akibatnya bangunan tempat tinggal yang dihuni oleh dua atau lebih rumah tangga akan dicacah berkali-kali sesuai dengan banyaknya rumah tangga yang ada. Karena itu, perlu dipahami bahwa hasil SP2010 tidak menggambarkan banyaknya bangunan tempat

Pencacahan SP2010 menggunakan pendekatan rumah tangga sehingga hasil SP2010 tidak menggambarkan banyaknya bangunan tempat tinggal di Indonesia, namun memperlihatkan gambaran tentang banyaknya rumah tangga di Indonesia yang menghuni bangunan tempat tinggal menurut karakteristiknya.

tinggal (rumah) di Indonesia, melainkan memperlihatkan gambaran tentang banyaknya rumah tangga di Indonesia yang menghuni bangunan tempat tinggal menurut karakteristiknya. Gambaran tersebut akan disajikan pada bahasan di bawah ini.

3.1 Kepemilikan Bangunan

3.1.1 Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal

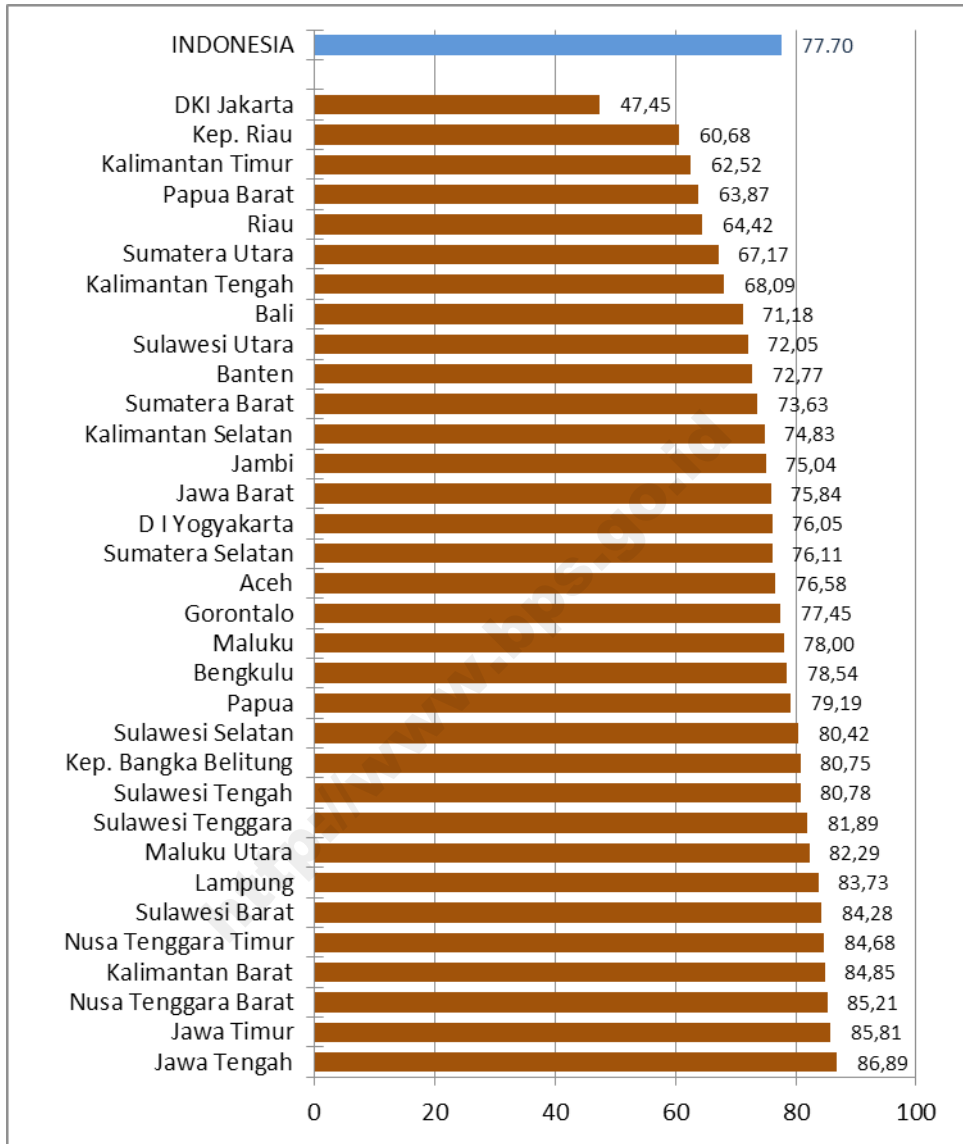
Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan setiap orang atau suatu rumah tangga. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak semua orang dapat memenuhinya dengan mudah. Kondisi ekonomi akan sangat memberikan pengaruh. Penduduk yang berpenghasilan lebih tinggi akan mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah dengan mudah dibanding penduduk yang berpenghasilan lebih rendah.

Tabel 4
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal dan Daerah Tempat Tinggal, 2010

Status Penguasaan Tempat Tinggal	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik sendiri	67,90	87,31	77,70
Kontrak	11,19	1,03	6,06
Sewa	10,26	1,40	5,79
Lainnya	10,65	10,26	10,45
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner C1 dan C2 Apartemen

Gambar 1
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri
Menurut Provinsi, 2010



Menurut hasil SP2010 rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 77,70 persen, sisanya 22,30 persen rumah tangga menempati rumah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 6,06 persen menempati rumah kontrak, sewa (5,79 persen), dan lainnya (10,45 persen). Persentase rumah tangga

Persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri di Indonesia sebesar 77,70 persen. Persentase terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 47,45 persen sedangkan persentase tertinggi terdapat di Jawa Tengah, yaitu sebesar 86,89 persen

yang menempati rumah bukan milik sendiri di daerah perkotaan (32,10 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan (12,69 persen).

Persentase terendah rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 47,45 persen sedangkan persentase tertinggi terdapat di Jawa Tengah, yaitu sebesar 86,89 persen.

3.1.2 Bukti Kepemilikan

Informasi bukti kepemilikan tanah tempat tinggal yang dikumpulkan melalui Sensus Penduduk 2010 yaitu mengenai Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART, SHM bukan atas nama ART, Sertifikat lain (SHGB, SHP, SSRS), dan Lainnya (Girik, Akte Jual Beli Notaris/PPAT, dan lain-lain).

Gambar 2
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Bangunan Milik Sendiri Menurut Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal dan Daerah Tempat Tinggal, 2010



Sumber: Diolah dari Kuesioner C1 dan C2 Apartemen

Hasil SP2010 menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki bukti kepemilikan tanah tempat tinggal adalah sebesar 71,10 persen, dengan komposisi di perkotaan sebesar 82,79 persen dan perdesaan 62,20 persen.

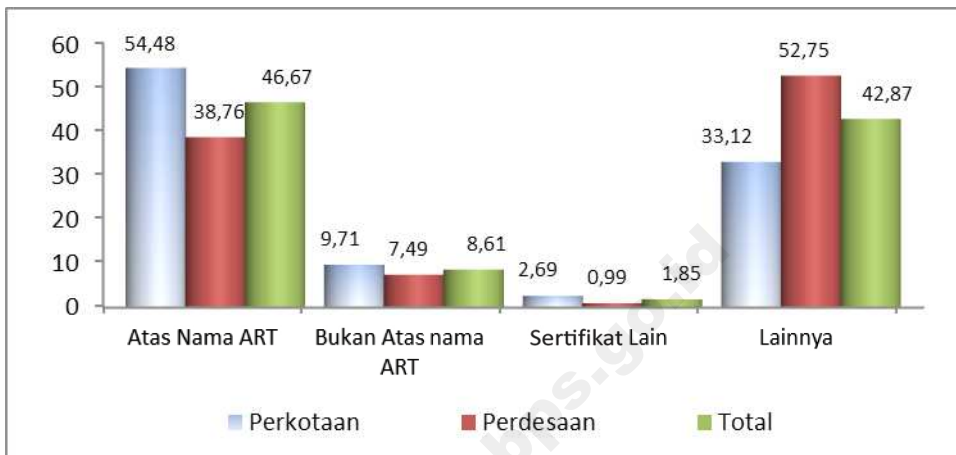
Jenis bukti kepemilikan tanah yang dimiliki rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebagian besar sudah SHM atas nama ART, yaitu sebesar 46,67 persen.

Jenis bukti kepemilikan tanah yang dimiliki rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebagian besar sudah SHM atas nama ART (46,67 persen) sedangkan untuk rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dengan jenis bukti kepemilikan masuk kategori Lainnya (Girik, Akte Jual Beli Notaris/PPAT, dan lain-lain) juga cukup besar, yaitu 42,87 persen

Artinya, hampir setengah dari rumah tangga di Indonesia menempati tempat tinggal yang tanahnya telah mempunyai kepastian hukum. Namun, persentase rumah tangga yang jenis bukti kepemilikannya masuk kategori Lainnya (Girik, Akte Jual Beli Notaris/PPAT, dan lain-lain) masih cukup besar, yaitu

42,87 persen dengan komposisi di perdesaan (52,75 persen) lebih banyak dibanding di perkotaan (33,12 persen). Karena itu, keberhasilan yang telah dilakukan pemerintah selama ini dalam meningkatkan status kepemilikan tanah dari Girik, Akte Jual Beli, dan sejenisnya menjadi SHM perlu ditingkatkan, terutama di daerah perdesaan.

Gambar 3
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Bangunan Milik Sendiri Menurut Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal dan Daerah Tempat Tinggal, 2010



Sumber: Diolah dari Kuesioner C1 dan C2 Apartemen

3.2 Jenis dan Luas Lantai

3.2.1 Jenis Lantai Terluas

Dilihat dari segi kesehatan, lantai bukan tanah dianggap lebih baik dibandingkan lantai tanah, bahkan rumah berlantai tanah dianggap sebagai salah satu kategori dari rumah tidak layak huni. Urutan dari yang paling baik untuk lantai bukan tanah menurut kualitasnya adalah keramik/marmer/granit, ubin/tegel/teraso, semen/bata merah, kayu/papan, bambu dan lainnya.

Sebagian besar rumah tangga di Indonesia sudah menggunakan jenis lantai terluas keramik/marmer/granit yaitu sebanyak 35,13 persen. Jenis ini adalah jenis lantai yang dianggap paling baik kualitasnya dibandingkan dengan lainnya. Menurut daerah tempat tinggal, penggunaan jenis lantai keramik/marmer/granit paling banyak di daerah perkotaan (50,94 persen), sedangkan pada daerah perdesaan sebagian besar rumah tangga masih menggunakan lantai semen/bata merah (34,54 persen).

Masih terdapat rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal yang berlantai tanah (10,55 persen). Mayoritas rumah berlantai tanah berada di daerah perdesaan yakni sebesar 17,00 persen, sedangkan di daerah perkotaan hanya sebesar 3,97 persen.

Tabel 5
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas dan Daerah Tempat Tinggal, 2010

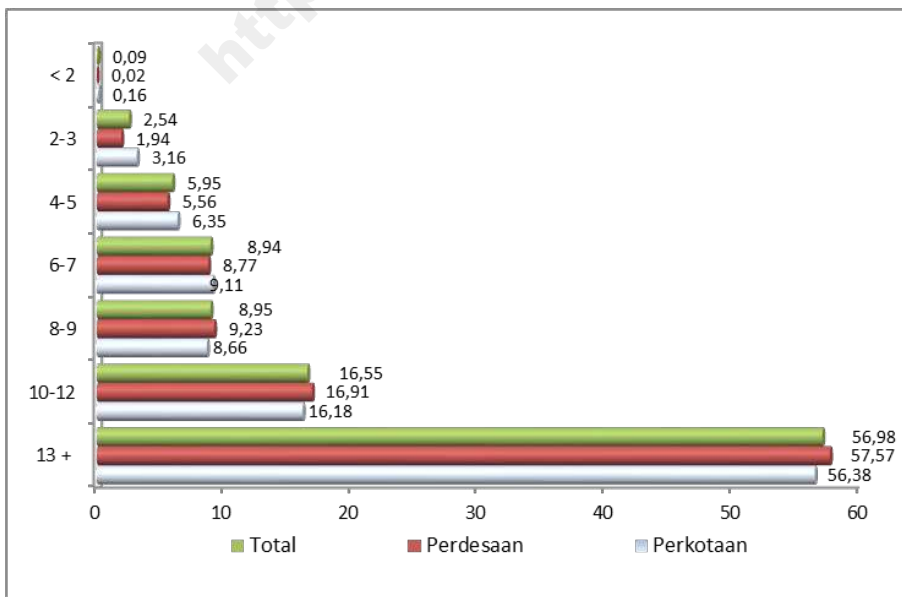
Jenis Lantai Terluas	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Keramik/marmer/granit	50,94	19,65	35,13
Ubin/tegel/teraso	12,82	7,36	10,06
Semen/bata merah	25,61	34,54	30,12
Kayu/papan	6,27	19,21	12,80
Bambu	0,3	2,10	1,24
Tanah	3,97	17,00	10,55
Lainnya	0,04	0,15	0,10
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner C1 dan C2 Apartemen

3.2.2 Luas Lantai

Luas lantai rumah seringkali dianggap sebagai gambaran untuk menilai kemampuan sosial masyarakat. Selain itu, luas lantai juga menentukan tingkat kesehatan penghuninya karena luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Selama ini alat ukur yang dipakai adalah luas lantai per kapita, yaitu rata-rata luas lantai untuk setiap anggota rumah tangga yang diperoleh dari hasil penghitungan total luas lantai dibagi total penduduk.

Gambar 4
Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita dan Daerah Tempat Tinggal, 2010



Sumber: Diolah dari Dokumen C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen

Pada Gambar 4 disajikan data luas lantai perkapita berdasarkan ukurannya. Sebagian besar rumah tangga di Indonesia mempunyai luas lantai perkapita sebesar 13 m² atau lebih (56,98 persen). Pada gambar tersebut terlihat adanya suatu pola, yaitu semakin besar ukuran per kapitanya semakin besar persentasenya.

Dalam buku Indikator Kesejahteraan Rakyat 2009 disebutkan bahwa menurut Kementerian Kesehatan, ukuran luas lantai per kapita yang ideal adalah 8 meter persegi, sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO) serta *American Public Health Association* (APHA) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 meter persegi.

Jika diklasifikasikan menurut Kementerian Kesehatan maka persentase rumah tangga dengan ukuran luas lantai per kapita ideal (minimal 8 meter persegi) sebesar 82,48 persen. Sementara itu, menurut klasifikasi WHO dan APHA maka persentase rumah tangga dengan ukuran luas lantai perkapita ideal (minimal 10 meter persegi) sebesar 73,53 persen.

3.3 Sumber Penerangan Utama

Sumber penerangan di rumah tangga juga aspek perumahan yang perlu diperhatikan. Karena dengan penerangan yang cukup, manusia bisa hidup sehat dan nyaman beraktifitas. Penerangan yang dianggap paling baik adalah listrik.

Secara umum rumah tangga di Indonesia sudah menikmati pembangunan infrastruktur listrik karena sebanyak 93,89 persen rumah tangga sudah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan rumah tangganya, dan hanya 6,11 persen rumah tangga yang belum menggunakan listrik. Rumah tangga yang sudah menggunakan penerangan listrik lebih banyak di perkotaan (99,22 persen) dibanding di perdesaan (88,68 persen).

Tabel 6
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama dan Daerah Tempat Tinggal, 2010

Sumber Penerangan Utama	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Listrik	99,22	88,68	93,89
- PLN dengan meteran	84,29	59,66	71,84
- PLN tanpa meteran	14,14	22,56	18,40
- Bukan PLN	0,79	6,45	3,65
2. Bukan Listrik	0,78	11,32	6,11
Jumlah	100,00	100,00	100,00

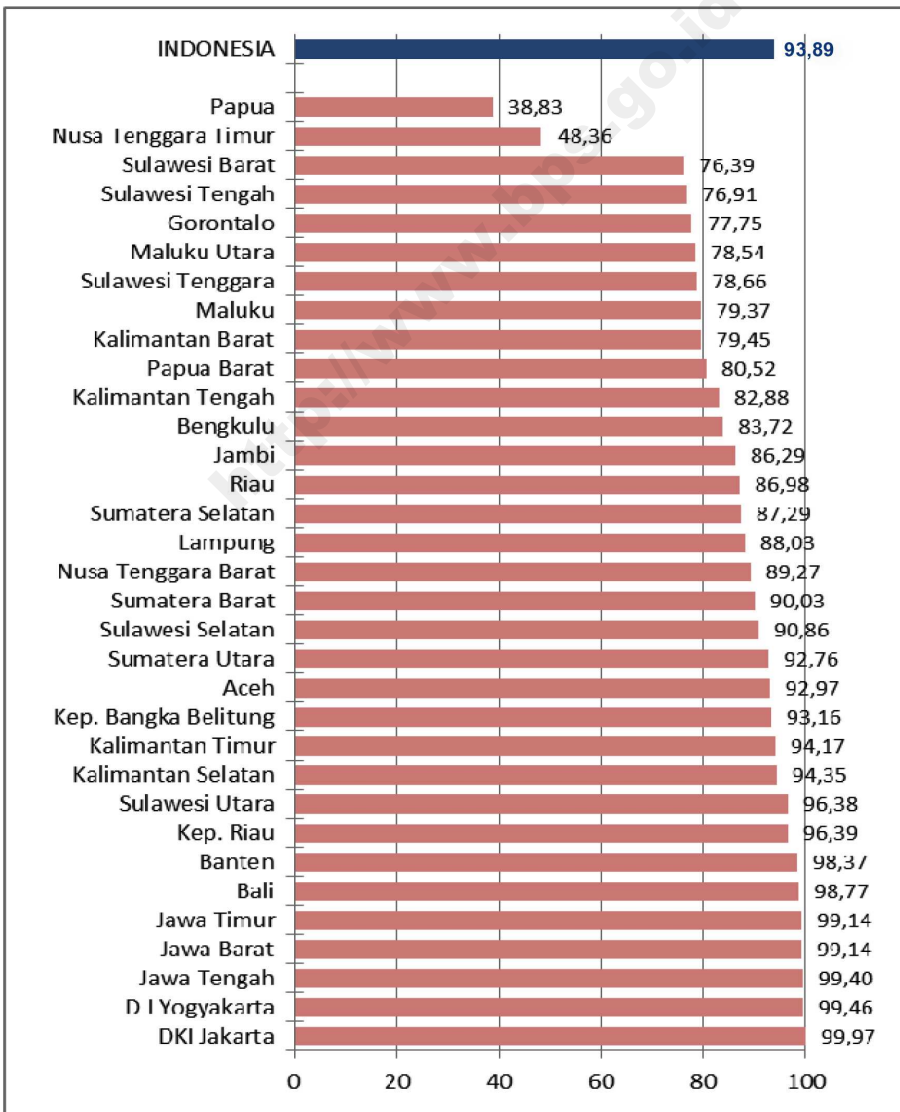
Sumber: Diolah dari Dokumen C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen

Provinsi Papua (38,83 persen) dan Nusa Tenggara Timur (48,36 persen) merupakan dua provinsi terendah yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan di rumah. Sementara itu, seluruh provinsi di Pulau Jawa sudah menggunakan listrik di atas 98 persen. Provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa yang telah menggunakan listrik di atas

Seluruh provinsi di Pulau Jawa sudah menggunakan listrik di atas 98 persen. Provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa yang telah menggunakan listrik di atas 90 persen berturut-turut adalah Bali (98,77 persen), Kepulauan Riau (96,39 persen), Sulawesi Utara (96,38 persen), Kalimantan Selatan (94,35 persen), Kalimantan Timur (94,17 persen), Kepulauan Bangka Belitung (93,16 persen), Aceh (92,97 persen), Sumatera Utara (92,76 persen), Sulawesi Selatan (90,86 persen), dan Sumatera Barat (90,03 persen)

90 persen berturut-turut adalah Bali (98,77 persen), Kepulauan Riau (96,39 persen), Sulawesi Utara (96,38 persen), Kalimantan Selatan (94,35 persen), Kalimantan Timur (94,17 persen), Kepulauan Bangka Belitung (93,16 persen), Aceh (92,97 persen), Sumatera Utara (92,76 persen), Sulawesi Selatan (90,86 persen), dan Sumatera Barat (90,03 persen).

Gambar 5
Persentase Rumah Tangga yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik Menurut Provinsi, 2010



3.4 Sumber Air Minum

Air merupakan kebutuhan hidup yang sangat penting bagi manusia, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. Dalam satu hari seseorang membutuhkan air minum rata-rata 1,5 liter (sekitar 8 gelas), artinya apabila satu rumah tangga ada lima orang anggota rumah tangga maka dalam satu hari rumah tangga tersebut membutuhkan minimal 7,5 liter air (40 gelas) untuk keperluan minum. Oleh karena itu, perlu pengadaan air minum yang cukup untuk setiap rumah tangga.

Tabel 7
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum dan Daerah Tempat Tinggal, 2010

Sumber Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Air kemasan	25,51	4,13	14,70
Ledeng sampai rumah	18,14	6,28	12,15
Ledeng eceran	4,88	2,26	3,55
Pompa	14,97	9,91	12,42
Sumur terlindung	27,28	36,90	32,14
Sumur tidak terlindung	3,58	11,62	7,64
Mata air terlindung	3,14	13,64	8,44
Mata air tidak terlindung	0,63	5,55	3,11
Air sungai	0,43	4,93	2,70
Air hujan	1,18	4,32	2,77
Lainnya	0,27	0,46	0,37
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen

Air yang berasal dari dalam tanah mempunyai hubungan dengan kelestarian lingkungan. Karena itu, penggunaan air minum yang berasal dari dalam tanah perlu dikurangi agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Berdasarkan hasil SP2010, kebutuhan air minum yang berasal dari dalam tanah (pompa, sumur terlindung, dan sumur tidak terlindung) masih diminati penduduk. Lebih dari setengah rumah tangga di Indonesia (52,20 persen) menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air minumnya.

Hasil SP2010 menunjukkan bahwa kebutuhan air minum yang berasal dari dalam tanah masih diminati penduduk, sebanyak 52,20 persen rumah tangga menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air minumnya.

Air kemasan, ledeng, dan pompa lebih banyak digunakan oleh rumah tangga di perkotaan. Sedangkan sumur, mata air, air sungai, dan air hujan lebih banyak digunakan oleh rumah tangga di perdesaan.

3.5 Sanitasi

3.5.1 Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Salah satu kebutuhan penting dalam rumah tinggal adalah tersedianya fasilitas sanitasi seperti tempat buang air besar. Rumah tangga akan cenderung memilih tempat tinggal yang memiliki tempat buang air besar sendiri dengan alasan bahwa fasilitas milik sendiri bisa lebih terjaga kebersihannya. Berdasarkan hasil SP 2010, persentase rumah tangga yang tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar mencapai 18,88 persen. Sebagian besar rumah tangga tersebut berada di daerah perdesaan, yaitu sebesar 29,34 persen, sementara di perkotaan hanya sebesar 8,20 persen.

Tabel 8
Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Daerah Tempat Tinggal, 2010

Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Jamban Sendiri	76,01	55,81	65,80
Jamban Bersama	12,96	10,51	11,72
Jamban Umum	2,83	4,34	3,59
Tidak ada	8,20	29,34	18,88
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen

3.5.2 Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Tempat penampungan kotoran/tinja sangat berpengaruh terhadap kesehatan anggota rumah tangga dan lingkungannya. Tempat penampungan yang tidak memenuhi syarat sanitasi akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar seperti mempengaruhi kualitas air tanah dan menimbulkan bau yang kurang sedap. Tempat penampungan yang paling memenuhi syarat kesehatan adalah tangki septik atau Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL). Hampir 75 persen rumah tangga di Indonesia telah menggunakan tangki septik/SPAL, dengan penyebarannya lebih banyak di perkotaan (85,57 persen) dibanding di perdesaan (59,94 persen).

Tabel 9
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Jamban Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Daerah Tempat Tinggal, 2010

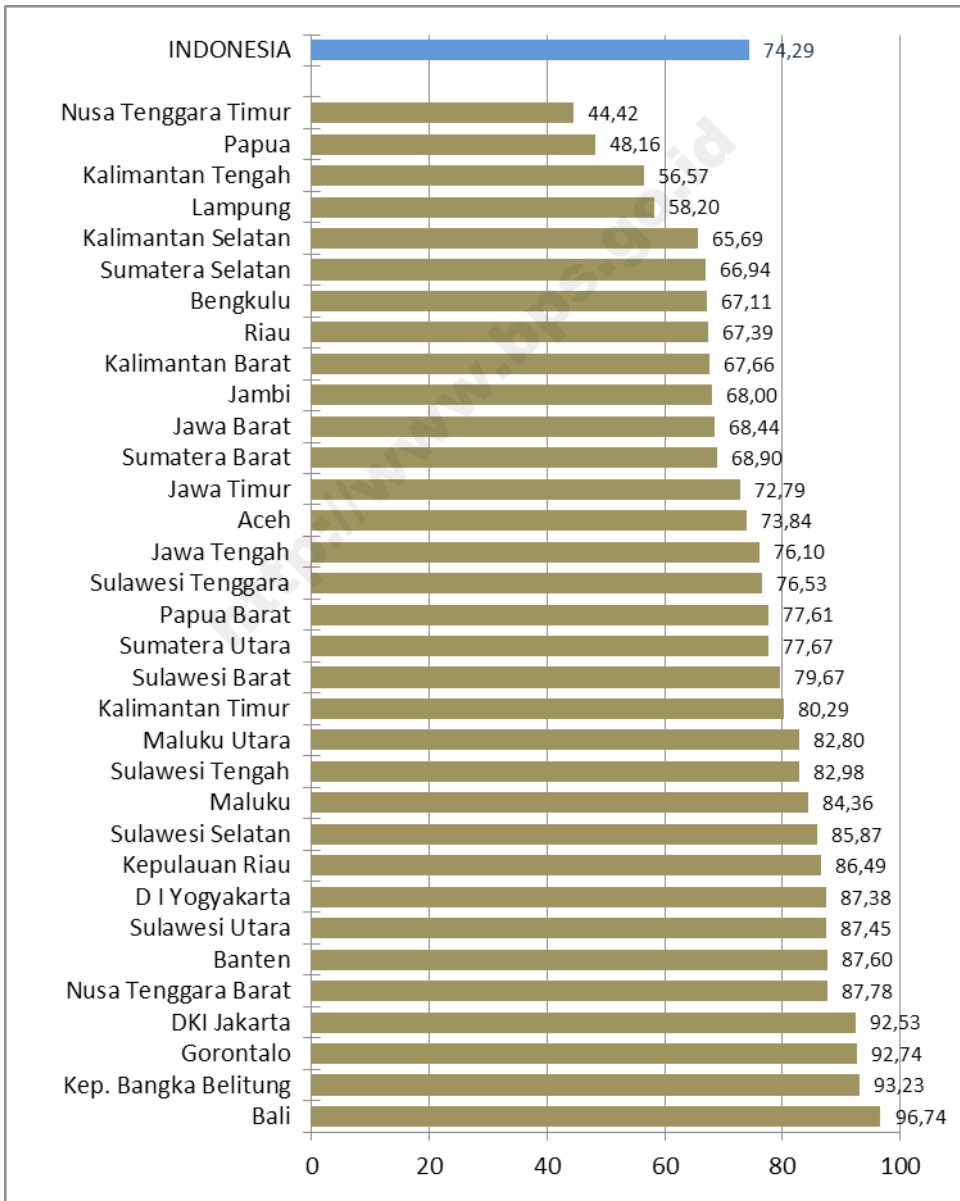
Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tangki septik	85,57	59,94	74,29
Tanpa tangki septik	9,52	27,13	17,27
Tidak punya	4,91	12,94	8,44
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1 dan C2 Apartemen

Tercatat empat provinsi rumah tangganya menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir lebih dari 90 persen yaitu Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, dan DKI Jakarta.

Hanya ada empat provinsi dengan persentase rumah tangga yang menggunakan tangki septik lebih dari 90 persen yaitu Bali (96,74 persen), Kepulauan Bangka Belitung (93,23 persen), Gorontalo (92,74 persen), dan DKI Jakarta (92,53 persen).

Gambar 6
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Jamban dan Tempat Akhir Pembuangan Tinjanya Tangki Septik Menurut Provinsi, 2010



3.6 Bahan Bakar untuk Memasak Sehari-hari

Secara umum bahan bakar untuk memasak dikelompokkan menjadi bahan bakar padat (kayu bakar, arang, dan lainnya) dan bahan bakar tidak padat (listrik, gas, dan minyak tanah). Isu penggunaan bahan bakar padat untuk memasak sedang hangat dibicarakan saat ini karena jenis bahan bakar ini dapat menyebabkan polusi udara serta dalam jangka panjang dapat menyebabkan menurunnya sumber daya hutan.

Tabel 10
Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Jenis Bahan Bakar yang Digunakan untuk Memasak, 2010

Jenis Bahan Bakar untuk Memasak	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bahan Bakar Tidak Padat	82,62	33,18	57,62
- Listrik	1,05	0,5	0,77
- Gas	66,51	24,28	45,16
- Minyak Tanah	15,06	8,4	11,69
2. Bahan Bakar Padat	14,37	66,58	40,76
- Arang	0,17	0,81	0,49
- Kayu Bakar	13,97	65,68	40,11
- Lainnya	0,23	0,09	0,16
3. Tidak pakai/tidak memasak	3,02	0,24	1,61
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1

Dari Tabel 10 terlihat bahwa penggunaan bahan bakar padat untuk keperluan memasak masih tinggi, yaitu sebesar 40,76 persen dengan distribusi lebih banyak di perdesaan (66,58 persen) dibanding di perkotaan (14,37 persen). Bila dilihat dari jenisnya, ada tiga jenis bahan bakar yang paling banyak digunakan rumah tangga, yaitu gas (45,16 persen), kayu bakar (40,11 persen), dan minyak tanah (11,69 persen).

Terdapat ketimpangan yang cukup besar antara daerah perkotaan dan perdesaan dalam hal penggunaan bahan bakar gas dan kayu bakar. Bahan bakar gas lebih banyak digunakan oleh rumah tangga di perkotaan daripada di perdesaan. Sementara kayu bakar lebih banyak digunakan oleh rumah tangga di perdesaan daripada di perkotaan.

Ada ketimpangan yang cukup besar antara daerah perkotaan dan perdesaan dalam hal penggunaan bahan bakar gas dan kayu bakar. Bahan bakar gas lebih banyak digunakan oleh rumah tangga di perkotaan (66,51 persen) dibanding perdesaan (24,28 persen). Sementara itu, kayu bakar lebih banyak digunakan oleh rumah tangga di perdesaan (65,68 persen) dibanding

di perkotaan (13,97 persen). Umumnya, penggunaan bahan bakar untuk memasak dipengaruhi oleh tingkat ekonomi masyarakat dan ketersediaan bahan bakar tersebut.

3.7 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Menurut Wikipedia Berbahasa Indonesia, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)/*Information and Communication Technologies* (ICT) adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.

Penggunaan teknologi informasi oleh rumah tangga berdasarkan hasil SP2010 tergambar sebagai berikut:

Tabel 11
Persentase Rumah Tangga Menurut Penguasaan Telepon dan Tipe Daerah, 2010

Penguasaan Telepon	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Telepon Kabel	1,25	0,27	0,75
Telepon Seluler	70,32	60,60	65,41
Telepon Kabel dan Seluler	13,43	1,14	7,22
Tidak Punya	15,00	37,99	26,62
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1 dan C2 Apartemen

Dalam hal komunikasi, penggunaan telepon seluler paling diminati. Sebanyak 65,41 persen rumah tangga di Indonesia menguasai telepon seluler, sedangkan rumah tangga yang menguasai telepon kabel hanya sebesar 0,75 persen. Adapun rumah tangga yang menguasai telepon kabel dan seluler sekaligus sebesar 7,22 persen.

Tabel 12
Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Internet selama 3 Bulan Terakhir dan Tipe Daerah, 2010

Akses Internet	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Ya	22,74	7,25	14,91
Tidak	77,26	92,75	85,09
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1 dan C2 Apartemen

Persentase rumah tangga Indonesia yang melakukan akses internet dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sebesar 14,91 persen.

Berdasarkan hasil SP2010, persentase rumah tangga di Indonesia yang melakukan akses internet dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sebesar 14,91 persen dengan distribusi di daerah perkotaan sebanyak 22,74 persen dan di daeran perdesaan baru sebesar 7,25 persen. Angka ini

masih tergolong rendah jika dibanding negara lain sehingga perlu usaha yang gigih agar pemanfaatan internet semakin populer di masyarakat. Karena internet adalah salah satu sumber informasi yang multi bidang dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa saja yang baru terjadi di tempat lain dapat diketahui dengan cepat.

<http://www.bps.go.id>

4. PENUTUP

Rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar penduduk yang masih menjadi permasalahan di Indonesia. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar tersebut, dua hal yang harus dikaji secara simultan yaitu permintaan dan penawaran rumah. Jumlah penduduk yang besar akan meningkatkan permintaan rumah. Tingginya permintaan rumah harus dirancang kebijakan penyediaan rumah yang sesuai kebutuhan masyarakat oleh pemerintah dengan bijak. Kebijakan yang berorientasi pada menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran rumah layak adalah sangat relevan dalam pembangunan sektor perumahan yang berkesinambungan sehingga target kebutuhan rumah dapat dipenuhi dengan tepat. Dengan keterbatasan sumber daya, pemerintah juga harus menciptakan kebijakan yang mendorong pelaku bisnis untuk melakukan investasi di sektor perumahan, karena bila terjadi ketidakseimbangan dapat berdampak pada kehidupan sosial di masyarakat.

Dengan diterbitkannya publikasi ringkas yang menggunakan data perumahan hasil SP2010 ini, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat di bidang perumahan di Indonesia sehingga permasalahan permintaan dan penawaran rumah dapat teratasi.

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (2010), Buku 6: Pedoman Pencacah Sensus Penduduk 2010, Jakarta.

Badan Pusat Statistik (2009), Indikator Kesejahteraan Rakyat 2009, Jakarta

<http://id.wikipedia.org>

<http://health.kompas.com/read/2011/07/19/11395784/Anjuran.Minum.Air.8.Gelas.Sehari.Tak.Menyesatkan>

<http://www.bps.go.id>

LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>

Tabel L1.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan/Penguasaan
Bangunan Tempat Tinggal, SP2010

Perkotaan

Provinsi	Milik Sendiri	Sewa	Kontrak	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	62,74	17,34	5,70	14,22	100,00
Sumatera Utara	60,40	14,90	10,80	13,90	100,00
Sumatera Barat	62,81	10,94	14,61	11,65	100,00
Riau	53,96	27,35	9,35	9,34	100,00
Jambi	63,76	8,74	16,81	10,70	100,00
Sumatera Selatan	63,43	10,46	14,23	11,88	100,00
Bengkulu	62,97	12,26	15,61	9,16	100,00
Lampung	71,68	7,00	11,16	10,16	100,00
Kep. Bangka Belitung	73,70	4,87	11,08	10,34	100,00
Kep. Riau	56,71	28,82	6,98	7,49	100,00
DKI Jakarta	47,45	17,71	27,68	7,16	100,00
Jawa Barat	68,96	6,70	12,29	12,05	100,00
Jawa Tengah	80,26	3,10	4,77	11,87	100,00
DI Yogyakarta	67,15	13,93	10,35	8,57	100,00
Jawa Timur	78,02	6,73	6,89	8,36	100,00
Banten	64,84	14,34	14,26	6,57	100,00
Bali	59,48	22,59	10,78	7,16	100,00
Nusa Tenggara Barat	78,35	4,31	5,36	11,98	100,00
Nusa Tenggara Timur	60,86	16,34	10,01	12,78	100,00
Kalimantan Barat	74,36	5,37	10,41	9,86	100,00
Kalimantan Tengah	60,88	20,25	6,98	11,88	100,00
Kalimantan Selatan	62,48	21,19	4,51	11,82	100,00
Kalimantan Timur	55,80	25,38	8,36	10,46	100,00
Sulawesi Utara	60,94	12,43	5,36	21,27	100,00
Sulawesi Tengah	61,67	14,77	10,26	13,29	100,00
Sulawesi Selatan	65,32	5,00	16,07	13,61	100,00
Sulawesi Tenggara	63,68	8,18	13,71	14,44	100,00
Gorontalo	66,56	4,26	3,69	25,49	100,00
Sulawesi Barat	75,43	5,95	7,00	11,62	100,00
Maluku	63,39	11,51	9,18	15,92	100,00
Maluku Utara	64,57	14,09	9,38	11,96	100,00
Papua Barat	48,34	27,58	6,14	17,94	100,00
Papua	45,48	29,47	6,48	18,56	100,00
INDONESIA	67,90	10,26	11,19	10,65	100,00

Tabel L1.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan/Penguasaan
Bangunan Tempat Tinggal, SP2010

Perdesaan

Provinsi	Milik Sendiri	Sewa	Kontrak	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	81,91	3,82	0,86	13,41	100,00
Sumatera Utara	73,53	5,57	3,00	17,90	100,00
Sumatera Barat	80,30	2,34	2,68	14,68	100,00
Riau	70,99	5,52	2,55	20,94	100,00
Jambi	79,82	1,95	2,43	15,80	100,00
Sumatera Selatan	82,68	2,07	1,69	13,56	100,00
Bengkulu	85,36	1,72	2,08	10,84	100,00
Lampung	87,60	1,09	1,39	9,92	100,00
Kep. Bangka Belitung	87,79	1,39	2,06	8,75	100,00
Kep. Riau	80,68	4,71	0,84	13,78	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	88,02	0,74	1,00	10,24	100,00
Jawa Tengah	92,22	0,29	0,32	7,18	100,00
DI Yogyakarta	95,00	0,42	0,45	4,13	100,00
Jawa Timur	92,52	0,46	0,46	6,56	100,00
Banten	90,01	0,60	0,87	8,52	100,00
Bali	89,48	0,77	1,02	8,74	100,00
Nusa Tenggara Barat	90,12	0,61	0,46	8,82	100,00
Nusa Tenggara Timur	90,39	0,87	0,81	7,94	100,00
Kalimantan Barat	89,23	1,08	1,38	8,30	100,00
Kalimantan Tengah	71,69	2,62	1,23	24,47	100,00
Kalimantan Selatan	83,62	3,06	0,70	12,62	100,00
Kalimantan Timur	73,53	6,91	1,73	17,83	100,00
Sulawesi Utara	81,26	1,31	0,88	16,55	100,00
Sulawesi Tengah	86,90	0,80	1,09	11,21	100,00
Sulawesi Selatan	88,85	0,74	0,63	9,77	100,00
Sulawesi Tenggara	88,78	0,63	0,83	9,75	100,00
Gorontalo	83,16	0,32	0,64	15,88	100,00
Sulawesi Barat	86,79	0,56	0,69	11,95	100,00
Maluku	87,22	1,30	1,35	10,13	100,00
Maluku Utara	89,04	1,64	1,36	7,97	100,00
Papua Barat	70,46	8,89	2,82	17,83	100,00
Papua	90,70	1,46	0,49	7,35	100,00
INDONESIA	87,31	1,40	1,03	10,26	100,00

Tabel L1.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan/Penguasaan
Bangunan Tempat Tinggal, SP2010

Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Milik Sendiri	Sewa	Kontrak	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	76,58	7,58	2,20	13,64	100,00
Sumatera Utara	67,17	10,09	6,77	15,96	100,00
Sumatera Barat	73,63	5,62	7,23	13,52	100,00
Riau	64,42	13,94	5,17	16,46	100,00
Jambi	75,04	3,97	6,71	14,28	100,00
Sumatera Selatan	76,11	4,94	5,97	12,98	100,00
Bengkulu	78,54	4,93	6,20	10,33	100,00
Lampung	83,73	2,52	3,76	9,98	100,00
Kep. Bangka Belitung	80,75	3,13	6,57	9,55	100,00
Kep. Riau	60,68	24,83	5,97	8,53	100,00
DKI Jakarta	47,45	17,71	27,68	7,16	100,00
Jawa Barat	75,84	4,55	8,22	11,40	100,00
Jawa Tengah	86,89	1,54	2,30	9,27	100,00
DI Yogyakarta	76,05	9,61	7,18	7,15	100,00
Jawa Timur	85,81	3,36	3,44	7,39	100,00
Banten	72,77	10,01	10,04	7,18	100,00
Bali	71,18	14,08	6,97	7,77	100,00
Nusa Tenggara Barat	85,21	2,15	2,50	10,13	100,00
Nusa Tenggara Timur	84,68	3,86	2,59	8,87	100,00
Kalimantan Barat	84,85	2,35	4,04	8,76	100,00
Kalimantan Tengah	68,09	8,49	3,15	20,27	100,00
Kalimantan Selatan	74,83	10,60	2,28	12,29	100,00
Kalimantan Timur	62,52	18,38	5,85	13,25	100,00
Sulawesi Utara	72,05	6,35	2,91	18,69	100,00
Sulawesi Tengah	80,78	4,19	3,31	11,72	100,00
Sulawesi Selatan	80,42	2,27	6,16	11,15	100,00
Sulawesi Tenggara	81,89	2,71	4,37	11,04	100,00
Gorontalo	77,45	1,68	1,69	19,18	100,00
Sulawesi Barat	84,28	1,75	2,09	11,88	100,00
Maluku	78,00	5,25	4,38	12,37	100,00
Maluku Utara	82,29	5,07	3,57	9,07	100,00
Papua Barat	63,87	14,46	3,81	17,86	100,00
Papua	79,19	8,59	2,02	10,21	100,00
INDONESIA	77,70	5,79	6,06	10,45	100,00

Tabel L2.1
**Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Bukti Kepemilikan/
 Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, SP2010**

Perkotaan

Provinsi	Ada Bukti Kepemilikan	Tidak Ada Bukti Kepemilikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	83,56	16,44	100,00
Sumatera Utara	86,09	13,91	100,00
Sumatera Barat	58,14	41,86	100,00
Riau	86,98	13,02	100,00
Jambi	83,87	16,13	100,00
Sumatera Selatan	82,17	17,83	100,00
Bengkulu	87,65	12,35	100,00
Lampung	81,90	18,10	100,00
Kep. Bangka Belitung	74,51	25,49	100,00
Kep. Riau	70,20	29,80	100,00
DKI Jakarta	93,52	6,48	100,00
Jawa Barat	81,74	18,26	100,00
Jawa Tengah	85,48	14,52	100,00
DI Yogyakarta	85,82	14,18	100,00
Jawa Timur	84,60	15,40	100,00
Banten	88,60	11,40	100,00
Bali	68,24	31,76	100,00
Nusa Tenggara Barat	53,02	46,98	100,00
Nusa Tenggara Timur	75,10	24,90	100,00
Kalimantan Barat	86,91	13,09	100,00
Kalimantan Tengah	82,22	17,78	100,00
Kalimantan Selatan	83,90	16,10	100,00
Kalimantan Timur	85,27	14,73	100,00
Sulawesi Utara	71,34	28,66	100,00
Sulawesi Tengah	74,23	25,77	100,00
Sulawesi Selatan	83,30	16,70	100,00
Sulawesi Tenggara	76,22	23,78	100,00
Gorontalo	67,76	32,24	100,00
Sulawesi Barat	61,51	38,49	100,00
Maluku	58,35	41,65	100,00
Maluku Utara	74,87	25,13	100,00
Papua Barat	73,51	26,49	100,00
Papua	71,24	28,76	100,00
INDONESIA	82,79	17,21	100,00

Tabel L2.2
**Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Bukti Kepemilikan/
 Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, SP2010**

Perdesaan

Provinsi	Ada Bukti Kepemilikan	Tidak Ada Bukti Kepemilikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	66,28	33,72	100,00
Sumatera Utara	57,72	42,28	100,00
Sumatera Barat	32,04	67,96	100,00
Riau	60,80	39,20	100,00
Jambi	57,94	42,06	100,00
Sumatera Selatan	59,91	40,09	100,00
Bengkulu	62,73	37,27	100,00
Lampung	75,26	24,74	100,00
Kep. Bangka Belitung	37,93	62,07	100,00
Kep. Riau	44,06	55,94	100,00
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	62,04	37,96	100,00
Jawa Tengah	77,69	22,31	100,00
DI Yogyakarta	76,67	23,33	100,00
Jawa Timur	71,23	28,77	100,00
Banten	68,77	31,23	100,00
Bali	54,75	45,25	100,00
Nusa Tenggara Barat	35,29	64,71	100,00
Nusa Tenggara Timur	36,68	63,32	100,00
Kalimantan Barat	41,76	58,24	100,00
Kalimantan Tengah	54,33	45,67	100,00
Kalimantan Selatan	48,40	51,60	100,00
Kalimantan Timur	58,57	41,43	100,00
Sulawesi Utara	52,52	47,48	100,00
Sulawesi Tengah	49,07	50,93	100,00
Sulawesi Selatan	59,21	40,79	100,00
Sulawesi Tenggara	59,91	40,09	100,00
Gorontalo	44,05	55,95	100,00
Sulawesi Barat	49,94	50,06	100,00
Maluku	25,65	74,35	100,00
Maluku Utara	29,77	70,23	100,00
Papua Barat	41,18	58,82	100,00
Papua	14,03	85,97	100,00
INDONESIA	62,20	37,80	100,00

Tabel L2.3
**Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Bukti Kepemilikan/
 Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, SP2010**

Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Ada Bukti Kepemilikan	Tidak Ada Bukti Kepemilikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	70,22	29,78	100,00
Sumatera Utara	70,07	29,93	100,00
Sumatera Barat	40,53	59,47	100,00
Riau	69,26	30,74	100,00
Jambi	64,50	35,50	100,00
Sumatera Selatan	66,25	33,75	100,00
Bengkulu	68,82	31,18	100,00
Lampung	76,64	23,36	100,00
Kep. Bangka Belitung	54,61	45,39	100,00
Kep. Riau	64,45	35,55	100,00
DKI Jakarta	93,52	6,48	100,00
Jawa Barat	73,49	26,51	100,00
Jawa Tengah	80,90	19,10	100,00
DI Yogyakarta	82,17	17,83	100,00
Jawa Timur	76,86	23,14	100,00
Banten	80,87	19,13	100,00
Bali	61,63	38,37	100,00
Nusa Tenggara Barat	42,08	57,92	100,00
Nusa Tenggara Timur	42,02	57,98	100,00
Kalimantan Barat	53,43	46,57	100,00
Kalimantan Tengah	62,64	37,36	100,00
Kalimantan Selatan	60,72	39,28	100,00
Kalimantan Timur	73,37	26,63	100,00
Sulawesi Utara	59,74	40,26	100,00
Sulawesi Tengah	53,73	46,27	100,00
Sulawesi Selatan	66,21	33,79	100,00
Sulawesi Tenggara	63,39	36,61	100,00
Gorontalo	51,05	48,95	100,00
Sulawesi Barat	52,22	47,78	100,00
Maluku	35,94	64,06	100,00
Maluku Utara	39,53	60,47	100,00
Papua Barat	48,47	51,53	100,00
Papua	22,39	77,61	100,00
INDONESIA	71,10	28,90	100,00

Tabel L3.1
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Memiliki Bukti Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Menurut Provinsi dan Jenis Bukti Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, SP2010

Perkotaan

Provinsi	SHM a.n ART	SHM bukan a.n ART	Sertifikat Lain	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	72,72	5,22	0,76	21,30	100,00
Sumatera Utara	57,28	8,62	2,07	32,03	100,00
Sumatera Barat	75,75	13,71	1,64	8,90	100,00
Riau	64,24	7,28	4,64	23,84	100,00
Jambi	72,18	11,94	0,99	14,89	100,00
Sumatera Selatan	61,80	10,47	3,16	24,57	100,00
Bengkulu	73,32	10,90	0,88	14,90	100,00
Lampung	61,59	9,94	2,16	26,31	100,00
Kep. Bangka Belitung	44,79	8,21	4,19	42,81	100,00
Kep. Riau	52,26	4,27	23,04	20,43	100,00
DKI Jakarta	53,37	10,92	2,74	32,97	100,00
Jawa Barat	44,52	7,01	2,90	45,57	100,00
Jawa Tengah	63,79	11,99	1,77	22,44	100,00
DI Yogyakarta	64,13	20,70	1,61	13,57	100,00
Jawa Timur	46,41	9,14	2,81	41,64	100,00
Banten	49,23	6,17	3,05	41,55	100,00
Bali	71,68	19,10	1,65	7,57	100,00
Nusa Tenggara Barat	57,34	19,86	1,34	21,46	100,00
Nusa Tenggara Timur	77,43	16,72	0,55	5,31	100,00
Kalimantan Barat	77,74	12,66	1,18	8,42	100,00
Kalimantan Tengah	70,61	9,62	3,70	16,08	100,00
Kalimantan Selatan	61,31	9,14	3,89	25,65	100,00
Kalimantan Timur	61,22	9,51	3,71	25,56	100,00
Sulawesi Utara	61,20	10,35	3,13	25,33	100,00
Sulawesi Tengah	74,53	12,97	0,62	11,89	100,00
Sulawesi Selatan	63,13	10,37	1,99	24,51	100,00
Sulawesi Tenggara	70,58	12,67	0,92	15,83	100,00
Gorontalo	73,74	12,09	0,65	13,52	100,00
Sulawesi Barat	67,08	11,80	0,93	20,19	100,00
Maluku	66,59	12,95	5,06	15,40	100,00
Maluku Utara	84,46	8,90	0,23	6,40	100,00
Papua Barat	85,39	7,36	2,59	4,66	100,00
Papua	85,34	8,24	1,17	5,25	100,00
INDONESIA	54,48	9,71	2,69	33,12	100,00

Tabel L3.2
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Memiliki Bukti Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Menurut Provinsi dan Jenis Bukti Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, SP2010

Perdesaan

Provinsi	SHM a.n ART	SHM bukan a.n ART	Sertifikat Lain	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	44,77	2,52	0,58	52,13	100,00
Sumatera Utara	33,17	3,67	0,91	62,25	100,00
Sumatera Barat	50,68	10,39	1,18	37,74	100,00
Riau	49,03	7,94	1,83	41,20	100,00
Jambi	48,52	11,90	1,17	38,40	100,00
Sumatera Selatan	45,78	9,28	2,41	42,53	100,00
Bengkulu	60,61	10,43	0,77	28,20	100,00
Lampung	43,96	9,59	1,10	45,35	100,00
Kep. Bangka Belitung	45,02	5,60	2,52	46,86	100,00
Kep. Riau	46,04	5,55	3,04	45,36	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	20,28	3,40	0,48	75,84	100,00
Jawa Tengah	43,39	7,79	0,63	48,19	100,00
DI Yogyakarta	62,45	15,68	0,80	21,06	100,00
Jawa Timur	29,69	7,00	0,98	62,33	100,00
Banten	21,88	3,60	0,62	73,89	100,00
Bali	51,10	27,03	0,92	20,96	100,00
Nusa Tenggara Barat	48,46	16,19	1,89	33,45	100,00
Nusa Tenggara Timur	65,97	9,01	1,78	23,25	100,00
Kalimantan Barat	50,80	8,35	1,49	39,36	100,00
Kalimantan Tengah	58,35	10,59	1,82	29,24	100,00
Kalimantan Selatan	42,35	7,83	1,81	48,02	100,00
Kalimantan Timur	54,71	12,14	1,67	31,48	100,00
Sulawesi Utara	41,10	5,38	1,08	52,45	100,00
Sulawesi Tengah	62,16	12,76	0,94	24,15	100,00
Sulawesi Selatan	43,40	6,38	1,86	48,37	100,00
Sulawesi Tenggara	57,78	13,57	0,77	27,87	100,00
Gorontalo	53,36	10,19	1,51	34,94	100,00
Sulawesi Barat	46,48	9,63	1,16	42,74	100,00
Maluku	71,09	9,22	1,37	18,32	100,00
Maluku Utara	79,14	5,97	0,75	14,15	100,00
Papua Barat	84,09	8,94	1,52	5,46	100,00
Papua	83,20	9,41	1,21	6,18	100,00
INDONESIA	38,76	7,49	0,99	52,75	100,00

Tabel L3.3
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Memiliki Bukti Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Menurut Provinsi dan Jenis Bukti Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, SP2010

Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	SHM a.n ART	SHM bukan a.n ART	Sertifikat Lain	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	52,34	3,25	0,63	43,78	100,00
Sumatera Utara	46,07	6,32	1,53	46,08	100,00
Sumatera Barat	62,38	11,94	1,40	24,28	100,00
Riau	55,20	7,67	2,97	34,15	100,00
Jambi	56,30	11,92	1,11	30,67	100,00
Sumatera Selatan	51,44	9,70	2,67	36,19	100,00
Bengkulu	64,56	10,57	0,80	24,06	100,00
Lampung	47,87	9,67	1,34	41,12	100,00
Kep. Bangka Belitung	44,88	7,22	3,56	44,34	100,00
Kep. Riau	51,32	4,46	20,03	24,18	100,00
DKI Jakarta	53,37	10,92	2,74	32,97	100,00
Jawa Barat	35,95	5,73	2,04	56,27	100,00
Jawa Tengah	52,26	9,62	1,12	37,00	100,00
DI Yogyakarta	63,50	18,83	1,30	16,36	100,00
Jawa Timur	37,44	7,99	1,83	52,74	100,00
Banten	40,17	5,32	2,25	52,26	100,00
Bali	62,72	22,55	1,33	13,40	100,00
Nusa Tenggara Barat	52,74	17,97	1,62	27,67	100,00
Nusa Tenggara Timur	68,81	10,92	1,47	18,79	100,00
Kalimantan Barat	62,13	10,16	1,36	26,35	100,00
Kalimantan Tengah	63,14	10,21	2,55	24,09	100,00
Kalimantan Selatan	51,44	8,46	2,81	37,30	100,00
Kalimantan Timur	58,90	10,44	2,98	27,67	100,00
Sulawesi Utara	50,30	7,66	2,01	40,03	100,00
Sulawesi Tengah	65,32	12,81	0,85	21,02	100,00
Sulawesi Selatan	50,62	7,84	1,91	39,64	100,00
Sulawesi Tenggara	61,07	13,34	0,81	24,78	100,00
Gorontalo	61,35	10,93	1,17	26,54	100,00
Sulawesi Barat	51,27	10,13	1,10	37,49	100,00
Maluku	68,79	11,13	3,25	16,83	100,00
Maluku Utara	81,32	7,17	0,54	10,97	100,00
Papua Barat	84,53	8,40	1,88	5,19	100,00
Papua	84,20	8,86	1,19	5,75	100,00
INDONESIA	46,67	8,61	1,85	42,87	100,00

Tabel L4.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Lantai Terluas Bangunan
Tempat Tinggal, SP2010

Perkotaan

Provinsi	Keramik Marmor/ Granit	Ubin/ Tegel/ Teraso	Semen/ Bata Merah	Kayu/ Papan	Bambu	Tanah	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	29,57	3,80	56,31	8,18	0,11	2,00	0,03	100,00
Sumatera Utara	33,32	5,26	54,86	5,42	0,04	1,08	0,02	100,00
Sumatera Barat	29,60	3,74	55,92	9,68	0,28	0,75	0,03	100,00
Riau	33,30	1,98	50,49	13,66	0,01	0,56	0,02	100,00
Jambi	28,48	2,88	49,48	17,67	0,13	1,34	0,02	100,00
Sumatera Selatan	34,14	4,56	40,71	19,45	0,07	1,01	0,07	100,00
Bengkulu	37,39	4,49	52,71	4,40	0,17	0,81	0,02	100,00
Lampung	33,97	5,57	53,60	1,92	0,17	4,73	0,02	100,00
Kep. Bangka Belitung	44,94	4,31	48,03	2,37	0,02	0,32	0,01	100,00
Kep. Riau	47,41	3,84	40,75	7,39	0,01	0,55	0,05	100,00
DKI Jakarta	75,01	12,94	7,60	4,08	0,01	0,33	0,03	100,00
Jawa Barat	62,75	15,21	14,56	3,62	1,13	2,68	0,04	100,00
Jawa Tengah	44,63	18,22	24,89	0,27	0,03	11,94	0,02	100,00
DI Yogyakarta	53,87	14,48	27,71	0,07	0,00	3,47	0,39	100,00
Jawa Timur	50,80	17,39	25,43	0,15	0,06	6,15	0,02	100,00
Banten	72,22	12,28	11,38	0,43	0,35	3,30	0,04	100,00
Bali	72,46	5,93	20,18	0,12	0,01	1,29	0,01	100,00
Nusa Tenggara Barat	27,25	2,22	60,29	4,35	0,67	5,19	0,03	100,00
Nusa Tenggara Timur	26,61	3,54	60,37	0,96	0,62	7,80	0,09	100,00
Kalimantan Barat	29,32	4,42	17,19	48,97	0,01	0,08	0,02	100,00
Kalimantan Tengah	25,24	1,70	16,34	56,43	0,01	0,22	0,06	100,00
Kalimantan Selatan	19,24	1,98	10,01	68,52	0,01	0,20	0,04	100,00
Kalimantan Timur	31,05	4,34	18,04	46,18	0,01	0,33	0,05	100,00
Sulawesi Utara	21,37	17,21	49,77	7,08	0,14	4,38	0,04	100,00
Sulawesi Tengah	22,98	12,47	54,08	9,13	0,14	1,16	0,03	100,00
Sulawesi Selatan	27,41	17,76	29,73	23,45	0,35	1,28	0,02	100,00
Sulawesi Tenggara	22,60	12,13	51,77	9,96	1,12	2,40	0,02	100,00
Gorontalo	25,35	10,88	59,99	2,07	0,26	1,35	0,10	100,00
Sulawesi Barat	15,38	10,68	31,49	39,54	0,89	2,00	0,01	100,00
Maluku	28,38	19,08	43,52	6,09	0,10	2,78	0,05	100,00
Maluku Utara	34,62	8,49	47,85	5,80	0,13	3,06	0,06	100,00
Papua Barat	20,39	13,38	49,88	14,87	0,03	1,41	0,04	100,00
Papua	25,70	10,34	45,44	15,82	0,08	2,19	0,44	100,00
INDONESIA	50,94	12,82	25,61	6,27	0,36	3,97	0,04	100,00

Tabel L4.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Lantai Terluas Bangunan
Tempat Tinggal, SP2010

Perdesaan

Provinsi	Keramik Marmar/ Granit	Ubin/ Tegel/ Teraso	Semen/ Bata Merah	Kayu/ Papan	Bambu	Tanah	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	9,43	0,90	58,69	20,29	1,13	9,52	0,05	100,00
Sumatera Utara	9,73	1,15	64,17	18,19	0,29	6,42	0,03	100,00
Sumatera Barat	10,44	1,07	63,79	22,09	0,71	1,83	0,07	100,00
Riau	8,64	0,91	50,31	36,79	0,04	3,28	0,03	100,00
Jambi	9,65	1,88	50,90	30,84	0,82	5,88	0,04	100,00
Sumatera Selatan	8,46	1,12	39,29	39,44	0,96	10,63	0,09	100,00
Bengkulu	12,48	1,67	59,40	16,89	1,31	8,23	0,03	100,00
Lampung	9,97	2,59	60,23	5,15	0,79	21,25	0,03	100,00
Kep. Bangka Belitung	28,40	2,01	62,18	6,14	0,06	1,20	0,01	100,00
Kep. Riau	9,52	0,68	35,14	53,94	0,06	0,62	0,03	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	37,75	14,43	14,48	19,70	6,40	7,21	0,04	100,00
Jawa Tengah	25,59	13,45	24,54	1,35	0,14	34,92	0,02	100,00
DI Yogyakarta	19,66	14,43	44,74	0,04	0,00	17,08	4,05	100,00
Jawa Timur	27,22	10,48	33,40	0,47	0,30	28,10	0,03	100,00
Banten	41,13	11,23	15,47	6,90	14,78	10,44	0,04	100,00
Bali	47,72	3,85	40,51	0,27	0,04	7,55	0,06	100,00
Nusa Tenggara Barat	10,04	0,90	57,99	17,48	2,88	10,67	0,04	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,49	0,84	35,14	5,51	10,13	44,61	0,29	100,00
Kalimantan Barat	5,56	1,64	15,50	76,00	0,39	0,85	0,07	100,00
Kalimantan Tengah	3,80	0,66	14,27	79,36	0,08	1,77	0,07	100,00
Kalimantan Selatan	3,68	0,59	10,37	83,64	0,46	1,25	0,02	100,00
Kalimantan Timur	6,74	1,01	12,40	78,24	0,05	1,54	0,03	100,00
Sulawesi Utara	7,10	8,79	58,37	15,31	0,44	9,91	0,08	100,00
Sulawesi Tengah	4,58	4,53	57,63	22,46	2,49	8,27	0,05	100,00
Sulawesi Selatan	5,78	3,25	23,39	63,50	1,49	2,58	0,02	100,00
Sulawesi Tenggara	5,65	2,85	43,10	36,23	4,48	7,66	0,03	100,00
Gorontalo	6,29	5,14	69,85	7,74	2,89	7,37	0,72	100,00
Sulawesi Barat	3,73	3,20	26,55	58,17	2,68	5,47	0,20	100,00
Maluku	10,07	7,94	55,87	7,47	1,35	17,09	0,22	100,00
Maluku Utara	6,77	3,54	59,82	9,40	1,83	18,58	0,07	100,00
Papua Barat	11,37	4,41	47,61	28,53	2,05	5,09	0,93	100,00
Papua	1,55	0,62	9,94	54,75	2,84	26,65	3,67	100,00
INDONESIA	19,65	7,36	34,54	19,21	2,10	17,00	0,15	100,00

Tabel L4.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Lantai Terluas Bangunan
Tempat Tinggal, SP2010

Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Keramik Marmor/ Granit	Ubin/ Tegel/ Teraso	Semen/ Bata Merah	Kayu/ Papan	Bambu	Tanah	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	15,03	1,70	58,03	16,92	0,85	7,43	0,04	100,00
Sumatera Utara	21,15	3,14	59,66	12,01	0,17	3,83	0,03	100,00
Sumatera Barat	17,75	2,09	60,79	17,36	0,54	1,42	0,05	100,00
Riau	18,16	1,32	50,38	27,86	0,03	2,23	0,03	100,00
Jambi	15,25	2,18	50,47	26,92	0,61	4,53	0,03	100,00
Sumatera Selatan	17,23	2,30	39,77	32,61	0,65	7,35	0,08	100,00
Bengkulu	20,07	2,53	57,36	13,09	0,96	5,97	0,02	100,00
Lampung	15,80	3,31	58,62	4,36	0,64	17,24	0,03	100,00
Kep. Bangka Belitung	36,66	3,16	55,11	4,26	0,04	0,76	0,01	100,00
Kep. Riau	41,14	3,32	39,82	15,09	0,02	0,57	0,05	100,00
DKI Jakarta	75,01	12,94	7,60	4,08	0,01	0,33	0,03	100,00
Jawa Barat	53,73	14,93	14,53	9,42	3,03	4,32	0,04	100,00
Jawa Tengah	34,07	15,57	24,69	0,87	0,09	24,68	0,02	100,00
DI Yogyakarta	42,94	14,46	33,15	0,06	0,00	7,82	1,56	100,00
Jawa Timur	38,14	13,68	29,71	0,32	0,19	17,93	0,03	100,00
Banten	62,43	11,95	12,67	2,46	4,90	5,55	0,04	100,00
Bali	62,81	5,12	28,10	0,18	0,02	3,73	0,03	100,00
Nusa Tenggara Barat	17,21	1,45	58,95	12,01	1,96	8,39	0,04	100,00
Nusa Tenggara Timur	7,96	1,36	40,02	4,63	8,29	37,49	0,25	100,00
Kalimantan Barat	12,56	2,46	15,99	68,03	0,28	0,62	0,06	100,00
Kalimantan Tengah	10,94	1,01	14,96	71,72	0,06	1,25	0,06	100,00
Kalimantan Selatan	10,15	1,17	10,22	77,36	0,28	0,81	0,03	100,00
Kalimantan Timur	21,84	3,08	15,90	58,33	0,03	0,79	0,04	100,00
Sulawesi Utara	13,57	12,61	54,47	11,58	0,30	7,40	0,06	100,00
Sulawesi Tengah	9,04	6,45	56,77	19,23	1,92	6,55	0,05	100,00
Sulawesi Selatan	13,53	8,44	25,66	49,16	1,08	2,11	0,02	100,00
Sulawesi Tenggara	10,30	5,40	45,48	29,01	3,56	6,21	0,02	100,00
Gorontalo	12,84	7,12	66,46	5,79	1,99	5,30	0,51	100,00
Sulawesi Barat	6,31	4,85	27,64	54,05	2,28	4,70	0,16	100,00
Maluku	17,16	12,25	51,09	6,94	0,87	11,55	0,15	100,00
Maluku Utara	14,45	4,91	56,52	8,40	1,36	14,30	0,06	100,00
Papua Barat	14,06	7,08	48,28	24,46	1,45	4,00	0,67	100,00
Papua	7,69	3,09	18,97	44,84	2,13	20,42	2,85	100,00
INDONESIA	35,13	10,06	30,12	12,80	1,24	10,55	0,10	100,00

Tabel L5.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan
Luas Lantai Per Kapita (m²/Org) Bangunan Tempat Tinggal, SP2010

Perkotaan

Provinsi	<2	2-3	4-5	6-7	8-9	10-12	13+	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	0,07	1,42	5,07	9,95	10,85	17,61	55,03	100,00
Sumatera Utara	0,06	1,82	5,33	8,74	9,30	17,36	57,39	100,00
Sumatera Barat	0,06	2,69	6,85	9,51	9,14	15,72	56,04	100,00
Riau	0,00	1,18	4,71	9,32	10,49	17,77	56,52	100,00
Jambi	0,01	1,20	4,43	8,25	10,30	16,66	59,16	100,00
Sumatera Selatan	0,01	3,80	9,74	13,16	12,88	16,85	43,56	100,00
Bengkulu	0,00	1,92	5,65	9,65	10,40	16,85	55,53	100,00
Lampung	0,00	1,38	4,21	8,06	9,46	17,26	59,63	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,02	0,93	4,07	8,52	9,71	17,68	59,08	100,00
Kep. Riau	0,00	2,23	6,48	10,91	9,88	18,46	52,02	100,00
DKI Jakarta	1,09	9,96	11,83	13,15	7,87	14,72	41,38	100,00
Jawa Barat	0,19	3,36	7,17	10,56	9,02	17,25	52,44	100,00
Jawa Tengah	0,00	0,82	2,48	4,88	6,44	14,13	71,25	100,00
DI Yogyakarta	0,03	1,22	2,66	5,00	11,15	14,39	65,55	100,00
Jawa Timur	0,10	2,10	4,09	5,80	7,14	15,01	65,76	100,00
Banten	0,00	3,13	7,28	10,91	7,94	18,16	52,57	100,00
Bali	0,00	5,06	9,51	10,46	8,38	16,66	49,93	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,07	4,60	10,54	14,90	11,38	19,16	39,35	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,05	5,49	12,38	14,87	13,77	17,19	36,24	100,00
Kalimantan Barat	0,00	1,47	5,11	8,50	10,28	16,64	58,01	100,00
Kalimantan Tengah	0,14	2,66	6,86	9,98	10,73	16,50	53,13	100,00
Kalimantan Selatan	0,00	2,35	6,65	9,60	10,72	16,84	53,84	100,00
Kalimantan Timur	0,00	2,29	6,17	8,99	10,32	16,59	55,64	100,00
Sulawesi Utara	0,04	3,38	8,25	12,37	10,32	16,05	49,60	100,00
Sulawesi Tengah	0,07	2,84	7,87	10,84	10,77	15,91	51,71	100,00
Sulawesi Selatan	0,00	3,52	7,48	9,42	9,45	15,17	54,97	100,00
Sulawesi Tenggara	0,01	3,16	8,06	10,79	11,01	17,20	49,76	100,00
Gorontalo	0,00	5,51	10,66	13,22	10,37	15,62	44,61	100,00
Sulawesi Barat	0,00	2,84	7,66	11,27	11,21	17,17	49,85	100,00
Maluku	0,00	5,26	10,78	14,41	11,42	16,72	41,41	100,00
Maluku Utara	0,00	4,00	8,09	9,26	10,33	15,22	53,10	100,00
Papua Barat	0,00	7,69	11,71	13,51	12,03	15,64	39,43	100,00
Papua	0,00	6,45	12,44	14,27	11,76	15,88	39,20	100,00
INDONESIA	0,16	3,16	6,35	9,11	8,66	16,18	56,38	100,00

Tabel L5.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan
Luas Lantai Per Kapita (m²/Org) Bangunan Tempat Tinggal, SP2010

Perdesaan

Provinsi	<2	2-3	4-5	6-7	8-9	10-12	13+	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	0,05	2,22	8,41	15,08	13,52	19,87	40,84	100,00
Sumatera Utara	0,02	4,03	9,92	13,65	11,12	18,49	42,77	100,00
Sumatera Barat	0,08	3,21	7,81	11,67	10,61	17,37	49,25	100,00
Riau	0,00	1,84	6,62	12,28	11,69	20,73	46,84	100,00
Jambi	0,01	1,56	5,92	10,21	11,64	19,11	51,55	100,00
Sumatera Selatan	0,00	2,89	9,02	12,37	12,76	19,45	43,50	100,00
Bengkulu	0,00	1,72	6,61	12,60	13,26	21,56	44,25	100,00
Lampung	0,00	0,72	3,09	6,88	9,40	18,02	61,89	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,01	0,78	3,83	8,32	9,35	18,64	59,08	100,00
Kep. Riau	0,00	2,88	8,60	13,31	10,67	18,78	45,75	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,04	1,27	5,01	9,70	11,04	19,83	53,13	100,00
Jawa Tengah	0,00	0,18	0,89	2,62	4,33	11,64	80,34	100,00
DI Yogyakarta	0,00	0,08	0,41	1,46	2,84	7,70	87,50	100,00
Jawa Timur	0,02	0,27	1,23	3,42	5,59	14,69	74,79	100,00
Banten	0,00	1,77	6,62	12,26	12,15	21,65	45,54	100,00
Bali	0,00	2,89	7,74	12,95	10,91	19,52	45,98	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,03	3,92	10,74	15,92	13,29	20,97	35,15	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,07	5,74	14,66	18,42	13,94	17,78	29,38	100,00
Kalimantan Barat	0,00	2,49	9,98	14,02	15,05	20,15	38,32	100,00
Kalimantan Tengah	0,12	2,80	8,39	12,02	12,61	20,62	43,44	100,00
Kalimantan Selatan	0,00	1,38	5,15	8,56	10,51	19,82	54,57	100,00
Kalimantan Timur	0,00	1,81	6,32	10,24	11,76	19,24	50,62	100,00
Sulawesi Utara	0,01	3,11	10,20	16,16	10,98	18,66	40,89	100,00
Sulawesi Tengah	0,10	3,71	10,34	13,98	12,92	18,12	40,83	100,00
Sulawesi Selatan	0,00	1,44	4,86	7,91	8,86	16,53	60,40	100,00
Sulawesi Tenggara	0,03	2,60	8,48	11,50	11,50	18,22	47,68	100,00
Gorontalo	0,00	9,09	16,38	16,47	11,65	15,60	30,81	100,00
Sulawesi Barat	0,01	4,58	9,99	13,36	11,70	17,30	43,06	100,00
Maluku	0,00	3,44	10,69	15,52	13,20	18,15	39,00	100,00
Maluku Utara	0,00	2,04	7,15	12,36	12,62	19,46	46,36	100,00
Papua Barat	0,00	4,02	10,50	15,97	13,97	18,06	37,48	100,00
Papua	0,00	21,46	30,86	17,16	9,17	9,54	11,81	100,00
INDONESIA	0,02	1,94	5,56	8,77	9,23	16,91	57,57	100,00

Tabel L5.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan
Luas Lantai Per Kapita (m²/Org) Bangunan Tempat Tinggal, SP2010

Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	<2	2-3	4-5	6-7	8-9	10-12	13+	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	0,06	2,00	7,48	13,66	12,77	19,24	44,78	100,00
Sumatera Utara	0,04	2,96	7,70	11,27	10,24	17,94	49,85	100,00
Sumatera Barat	0,07	3,01	7,44	10,85	10,05	16,74	51,83	100,00
Riau	0,00	1,59	5,88	11,14	11,23	19,59	50,57	100,00
Jambi	0,01	1,45	5,48	9,63	11,24	18,39	53,81	100,00
Sumatera Selatan	0,00	3,20	9,27	12,64	12,80	18,57	43,52	100,00
Bengkulu	0,00	1,78	6,32	11,70	12,39	20,12	47,69	100,00
Lampung	0,00	0,88	3,36	7,16	9,42	17,83	61,34	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,01	0,86	3,95	8,42	9,53	18,16	59,08	100,00
Kep. Riau	0,00	2,34	6,83	11,31	10,01	18,52	50,98	100,00
DKI Jakarta	1,09	9,96	11,83	13,15	7,87	14,72	41,38	100,00
Jawa Barat	0,14	2,60	6,39	10,25	9,75	18,18	52,69	100,00
Jawa Tengah	0,00	0,47	1,60	3,63	5,27	12,75	76,29	100,00
DI Yogyakarta	0,02	0,86	1,94	3,87	8,50	12,25	72,56	100,00
Jawa Timur	0,06	1,12	2,55	4,52	6,30	14,83	70,61	100,00
Banten	0,00	2,70	7,08	11,34	9,27	19,26	50,36	100,00
Bali	0,00	4,21	8,82	11,43	9,36	17,77	48,39	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,04	4,20	10,65	15,49	12,50	20,21	36,90	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,07	5,69	14,22	17,74	13,91	17,67	30,70	100,00
Kalimantan Barat	0,00	2,18	8,54	12,39	13,64	19,11	44,13	100,00
Kalimantan Tengah	0,13	2,75	7,88	11,34	11,98	19,24	46,67	100,00
Kalimantan Selatan	0,00	1,78	5,78	8,99	10,60	18,58	54,27	100,00
Kalimantan Timur	0,00	2,11	6,23	9,46	10,86	17,59	53,74	100,00
Sulawesi Utara	0,02	3,23	9,31	14,44	10,68	17,48	44,84	100,00
Sulawesi Tengah	0,10	3,50	9,74	13,22	12,40	17,58	43,47	100,00
Sulawesi Selatan	0,00	2,19	5,80	8,45	9,07	16,04	58,45	100,00
Sulawesi Tenggara	0,02	2,75	8,36	11,30	11,36	17,94	48,25	100,00
Gorontalo	0,00	7,86	14,41	15,35	11,21	15,61	35,56	100,00
Sulawesi Barat	0,01	4,20	9,47	12,90	11,59	17,27	44,56	100,00
Maluku	0,00	4,15	10,73	15,09	12,51	17,59	39,93	100,00
Maluku Utara	0,00	2,58	7,41	11,51	11,99	18,29	48,22	100,00
Papua Barat	0,00	5,11	10,86	15,23	13,39	17,34	38,06	100,00
Papua	0,00	17,68	26,22	16,43	9,82	11,14	18,71	100,00
INDONESIA	0,09	2,54	5,95	8,94	8,95	16,55	56,98	100,00

Tabel L6.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Penerangan Utama
Bangunan Tempat Tinggal, SP2010

Perkotaan

Provinsi	Listrik PLN Meteran	Listrik PLN Tanpa Meteran	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	95,49	2,53	0,82	1,15	100,00
Sumatera Utara	93,50	4,95	0,54	1,01	100,00
Sumatera Barat	88,14	8,24	0,93	2,69	100,00
Riau	74,38	16,69	6,44	2,49	100,00
Jambi	79,49	12,66	4,53	3,32	100,00
Sumatera Selatan	83,02	14,01	1,15	1,82	100,00
Bengkulu	85,21	11,73	0,97	2,09	100,00
Lampung	77,68	16,77	3,37	2,18	100,00
Kep. Bangka Belitung	61,41	28,54	7,22	2,82	100,00
Kep. Riau	81,22	12,00	5,16	1,62	100,00
DKI Jakarta	94,08	5,78	0,12	0,03	100,00
Jawa Barat	85,23	14,17	0,30	0,29	100,00
Jawa Tengah	84,61	15,08	0,03	0,27	100,00
DI Yogyakarta	88,83	10,79	0,00	0,38	100,00
Jawa Timur	82,48	16,92	0,35	0,24	100,00
Banten	88,72	10,71	0,31	0,27	100,00
Bali	89,63	10,05	0,06	0,25	100,00
Nusa Tenggara Barat	42,47	47,82	5,29	4,42	100,00
Nusa Tenggara Timur	65,11	30,18	0,52	4,19	100,00
Kalimantan Barat	85,40	11,58	1,43	1,59	100,00
Kalimantan Tengah	76,02	18,14	2,97	2,86	100,00
Kalimantan Selatan	83,32	15,26	0,65	0,78	100,00
Kalimantan Timur	74,85	21,33	2,74	1,08	100,00
Sulawesi Utara	81,14	17,10	0,43	1,33	100,00
Sulawesi Tengah	76,73	19,21	1,15	2,91	100,00
Sulawesi Selatan	82,45	16,01	0,52	1,02	100,00
Sulawesi Tenggara	65,43	28,62	2,01	3,94	100,00
Gorontalo	71,02	23,31	0,74	4,93	100,00
Sulawesi Barat	70,59	21,53	2,69	5,18	100,00
Maluku	85,76	7,87	1,54	4,83	100,00
Maluku Utara	81,93	11,58	4,12	2,37	100,00
Papua Barat	80,59	16,31	1,20	1,90	100,00
Papua	70,65	19,81	3,48	6,06	100,00
INDONESIA	84,29	14,14	0,79	0,78	100,00

Tabel L6.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Penerangan Utama
Bangunan Tempat Tinggal, SP2010

Perdesaan

Provinsi	Listrik PLN Meteran	Listrik PLN Tanpa Meteran	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	83,80	4,56	2,35	9,29	100,00
Sumatera Utara	74,11	8,27	4,53	13,09	100,00
Sumatera Barat	63,39	17,02	5,14	14,44	100,00
Riau	24,30	14,10	41,99	19,61	100,00
Jambi	47,02	18,01	16,89	18,09	100,00
Sumatera Selatan	46,19	19,56	15,90	18,36	100,00
Bengkulu	48,58	16,90	12,03	22,49	100,00
Lampung	51,25	21,30	12,34	15,10	100,00
Kep. Bangka Belitung	31,01	25,77	32,37	10,85	100,00
Kep. Riau	32,07	15,62	38,65	13,67	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	70,49	26,63	1,03	1,86	100,00
Jawa Tengah	73,46	25,41	0,27	0,86	100,00
DI Yogyakarta	77,29	21,80	0,04	0,87	100,00
Jawa Timur	66,47	30,90	1,25	1,39	100,00
Banten	69,65	24,74	1,03	4,58	100,00
Bali	71,36	25,39	0,50	2,75	100,00
Nusa Tenggara Barat	25,57	48,81	10,38	15,24	100,00
Nusa Tenggara Timur	17,94	10,62	8,43	63,01	100,00
Kalimantan Barat	44,39	15,87	11,26	28,48	100,00
Kalimantan Tengah	35,47	13,84	26,45	24,24	100,00
Kalimantan Selatan	63,12	21,60	6,17	9,11	100,00
Kalimantan Timur	40,78	21,62	23,96	13,64	100,00
Sulawesi Utara	66,94	25,02	2,52	5,52	100,00
Sulawesi Tengah	41,38	17,85	11,23	29,54	100,00
Sulawesi Selatan	60,88	18,57	6,87	13,68	100,00
Sulawesi Tenggara	32,63	28,42	11,02	27,93	100,00
Gorontalo	35,88	24,64	8,16	31,33	100,00
Sulawesi Barat	27,96	11,87	31,34	28,83	100,00
Maluku	54,82	4,07	10,51	30,60	100,00
Maluku Utara	43,05	8,44	19,79	28,72	100,00
Papua Barat	44,42	8,17	20,49	26,92	100,00
Papua	10,54	2,15	7,56	79,75	100,00
INDONESIA	59,66	22,56	6,45	11,32	100,00

Tabel L6.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Penerangan Utama
Bangunan Tempat Tinggal, SP2010

Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Listrik PLN Meteran	Listrik PLN Tanpa Meteran	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	87,05	4,00	1,92	7,03	100,00
Sumatera Utara	83,50	6,66	2,60	7,24	100,00
Sumatera Barat	72,82	13,67	3,54	9,97	100,00
Riau	43,57	15,10	28,31	13,02	100,00
Jambi	56,64	16,42	13,22	13,71	100,00
Sumatera Selatan	58,76	17,66	10,86	12,71	100,00
Bengkulu	59,73	15,33	8,66	16,28	100,00
Lampung	57,66	20,20	10,17	11,97	100,00
Kep. Bangka Belitung	46,20	27,15	19,81	6,84	100,00
Kep. Riau	73,08	12,60	10,71	3,61	100,00
DKI Jakarta	94,08	5,78	0,12	0,03	100,00
Jawa Barat	79,91	18,66	0,57	0,86	100,00
Jawa Tengah	78,43	20,81	0,16	0,60	100,00
DI Yogyakarta	85,14	14,31	0,02	0,54	100,00
Jawa Timur	73,88	24,42	0,83	0,86	100,00
Banten	82,71	15,13	0,53	1,63	100,00
Bali	82,51	16,03	0,23	1,23	100,00
Nusa Tenggara Barat	32,61	48,40	8,26	10,73	100,00
Nusa Tenggara Timur	27,06	14,40	6,90	51,64	100,00
Kalimantan Barat	56,49	14,60	8,36	20,55	100,00
Kalimantan Tengah	48,99	15,27	18,62	17,12	100,00
Kalimantan Selatan	71,51	18,96	3,88	5,65	100,00
Kalimantan Timur	61,94	21,44	10,78	5,83	100,00
Sulawesi Utara	73,38	21,43	1,57	3,62	100,00
Sulawesi Tengah	49,95	18,18	8,79	23,09	100,00
Sulawesi Selatan	68,61	17,66	4,59	9,14	100,00
Sulawesi Tenggara	41,64	28,48	8,54	21,34	100,00
Gorontalo	47,96	24,18	5,61	22,25	100,00
Sulawesi Barat	37,37	14,00	25,01	23,61	100,00
Maluku	66,80	5,54	7,04	20,63	100,00
Maluku Utara	53,77	9,31	15,47	21,46	100,00
Papua Barat	55,17	10,59	14,76	19,48	100,00
Papua	25,69	6,60	6,53	61,17	100,00
INDONESIA	71,84	18,40	3,65	6,11	100,00

Tabel L7.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan
Sumber Utama Air Minum, SP2010

Perkotaan

Provinsi	Air Kemasan	Ledeng Sampai Rumah	Ledeng Eceran	Pompa	Sumur Terlindung	Sumur tak Terlindung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	48,49	12,75	3,13	3,30	23,89	3,71
Sumatera Utara	21,60	32,70	4,03	8,73	26,38	3,47
Sumatera Barat	23,40	27,43	2,05	5,34	29,40	5,82
Riau	47,91	2,35	0,76	7,37	23,01	4,43
Jambi	21,67	28,83	1,43	1,76	27,81	6,02
Sumatera Selatan	19,24	34,85	7,92	0,96	27,56	5,37
Bengkulu	20,61	20,08	0,87	2,19	33,76	19,99
Lampung	23,33	6,45	4,20	4,70	46,81	11,81
Kep. Bangka Belitung	37,92	2,65	0,32	8,33	39,12	9,66
Kep. Riau	58,65	15,30	2,42	0,56	15,91	3,63
DKI Jakarta	50,69	19,60	5,32	18,51	5,51	0,12
Jawa Barat	23,97	11,16	3,50	20,67	30,27	4,18
Jawa Tengah	7,90	19,54	6,94	15,04	41,66	4,42
DI Yogyakarta	17,67	7,38	0,21	8,94	59,47	5,00
Jawa Timur	20,50	16,36	5,85	18,62	29,52	2,69
Banten	40,79	7,95	4,14	28,75	14,72	1,74
Bali	42,72	27,23	1,12	3,94	16,24	0,71
Nusa Tenggara Barat	15,53	16,53	7,23	4,92	43,42	5,12
Nusa Tenggara Timur	5,41	43,14	12,65	0,77	28,35	3,53
Kalimantan Barat	20,20	9,82	1,14	0,55	6,06	1,71
Kalimantan Tengah	22,81	29,96	2,98	17,04	14,60	3,11
Kalimantan Selatan	12,18	46,42	15,07	2,89	11,96	6,45
Kalimantan Timur	33,78	44,25	6,36	1,97	5,04	1,25
Sulawesi Utara	31,18	22,05	5,71	6,79	24,92	4,13
Sulawesi Tengah	27,59	29,41	4,66	19,95	9,33	1,58
Sulawesi Selatan	29,68	33,62	8,73	7,81	14,76	3,00
Sulawesi Tenggara	19,05	32,95	5,04	7,30	25,50	3,47
Gorontalo	12,40	26,15	5,38	7,90	41,51	3,83
Sulawesi Barat	18,43	23,12	6,34	7,69	28,98	5,46
Maluku	8,14	29,51	12,16	6,32	26,05	2,53
Maluku Utara	7,38	49,69	5,72	2,17	27,34	2,92
Papua Barat	33,95	23,12	4,03	5,30	19,24	2,51
Papua	34,88	30,51	3,53	2,89	13,55	3,01
INDONESIA	25,51	18,14	4,88	14,97	27,28	3,58

Tabel L7.1 Lanjutan ...
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi Dan
Sumber Utama Air Minum, SP2010

Perkotaan

Provinsi	Mata Air Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Sungai	Hujan	Lainnya	Jumlah
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Aceh	2,06	0,98	0,70	0,76	0,22	100,00
Sumatera Utara	1,72	0,30	0,42	0,36	0,31	100,00
Sumatera Barat	3,01	1,24	0,76	1,15	0,40	100,00
Riau	0,90	0,11	0,34	12,64	0,19	100,00
Jambi	0,39	0,26	0,63	10,77	0,43	100,00
Sumatera Selatan	0,32	0,14	2,61	0,84	0,19	100,00
Bengkulu	1,40	0,54	0,13	0,21	0,22	100,00
Lampung	1,55	0,43	0,25	0,05	0,42	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,88	0,27	0,20	0,36	0,28	100,00
Kep. Riau	2,00	0,32	0,11	0,86	0,24	100,00
DKI Jakarta	0,10	0,00	0,00	0,10	0,06	100,00
Jawa Barat	4,41	1,28	0,16	0,03	0,37	100,00
Jawa Tengah	3,28	0,71	0,20	0,12	0,19	100,00
DI Yogyakarta	0,89	0,08	0,01	0,01	0,33	100,00
Jawa Timur	5,35	0,41	0,18	0,26	0,28	100,00
Banten	0,97	0,35	0,16	0,15	0,27	100,00
Bali	6,83	0,48	0,28	0,33	0,10	100,00
Nusa Tenggara Barat	5,74	0,94	0,40	0,02	0,16	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,49	0,92	0,34	0,07	1,34	100,00
Kalimantan Barat	0,96	0,19	2,70	56,53	0,14	100,00
Kalimantan Tengah	0,55	0,28	6,28	2,19	0,21	100,00
Kalimantan Selatan	0,16	0,13	4,60	0,07	0,07	100,00
Kalimantan Timur	0,50	0,17	2,06	4,13	0,49	100,00
Sulawesi Utara	3,63	0,87	0,07	0,41	0,24	100,00
Sulawesi Tengah	5,72	0,66	0,67	0,06	0,36	100,00
Sulawesi Selatan	1,15	0,19	0,67	0,30	0,11	100,00
Sulawesi Tenggara	4,15	1,22	0,35	0,77	0,20	100,00
Gorontalo	2,02	0,39	0,09	0,01	0,33	100,00
Sulawesi Barat	4,70	1,34	3,88	0,04	0,02	100,00
Maluku	13,58	0,45	0,49	0,75	0,01	100,00
Maluku Utara	0,70	0,12	0,16	3,60	0,21	100,00
Papua Barat	2,81	0,37	0,65	7,86	0,16	100,00
Papua	2,42	1,27	0,82	6,57	0,55	100,00
INDONESIA	3,14	0,63	0,43	1,18	0,27	100,00

Tabel L7.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan
Sumber Utama Air Minum, SP2010

Perdesaan

Provinsi	Air Kemasan	Ledeng Sampai Rumah	Ledeng Eceran	Pompa	Sumur Terlindung	Sumur tak Terlindung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	9,52	5,66	1,99	2,46	44,65	19,37
Sumatera Utara	3,55	5,58	2,53	15,20	27,95	13,17
Sumatera Barat	6,25	11,73	2,63	1,30	32,19	15,33
Riau	8,39	1,45	0,46	3,10	32,70	19,93
Jambi	6,45	8,48	0,46	1,44	36,66	21,51
Sumatera Selatan	3,97	3,44	0,96	2,45	46,77	16,32
Bengkulu	2,59	7,23	0,76	1,02	31,39	38,66
Lampung	2,84	1,85	0,43	1,78	55,34	25,41
Kep. Bangka Belitung	14,16	1,74	0,38	3,74	53,63	19,76
Kep. Riau	6,74	2,49	0,65	1,02	39,60	27,97
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	6,75	4,18	2,38	13,95	34,10	11,01
Jawa Tengah	2,13	6,63	2,18	11,11	43,33	7,81
DI Yogyakarta	0,50	7,79	1,34	5,02	50,36	7,37
Jawa Timur	3,64	7,05	1,85	17,39	42,41	6,16
Banten	9,87	2,79	2,52	12,42	32,51	15,65
Bali	2,57	33,08	2,08	1,84	13,59	1,45
Nusa Tenggara Barat	3,33	6,89	4,85	8,15	49,49	6,65
Nusa Tenggara Timur	0,23	4,59	6,78	0,59	21,20	7,55
Kalimantan Barat	1,75	5,74	1,59	1,55	9,84	7,64
Kalimantan Tengah	2,33	7,78	1,17	8,18	18,79	10,35
Kalimantan Selatan	3,10	8,55	5,74	15,54	14,72	19,48
Kalimantan Timur	12,59	14,42	2,60	4,71	15,63	11,94
Sulawesi Utara	5,50	11,45	7,61	2,04	35,32	10,45
Sulawesi Tengah	1,20	10,92	3,64	9,70	26,42	11,39
Sulawesi Selatan	2,56	6,11	1,97	16,06	36,79	12,82
Sulawesi Tenggara	1,13	8,02	3,43	3,19	39,52	13,20
Gorontalo	1,72	6,29	4,78	2,99	54,65	15,03
Sulawesi Barat	1,52	4,39	1,68	4,02	31,60	16,46
Maluku	0,59	3,38	3,45	3,40	44,43	7,68
Maluku Utara	0,90	11,90	4,45	1,42	47,05	13,16
Papua Barat	12,86	8,19	1,20	1,47	19,48	9,30
Papua	1,84	1,29	0,93	0,40	6,15	6,36
INDONESIA	4,13	6,28	2,26	9,91	36,90	11,62

Tabel L7.2 Lanjutan ...
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi Dan
Sumber Utama Air Minum, SP2010

Perdesaan

Provinsi	Mata Air Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Sungai	Hujan	Lainnya	Jumlah
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Aceh	5,86	3,31	5,18	1,42	0,59	100,00
Sumatera Utara	12,83	6,60	6,48	4,91	1,20	100,00
Sumatera Barat	11,11	9,15	5,34	4,33	0,65	100,00
Riau	1,22	0,94	3,74	27,62	0,44	100,00
Jambi	2,10	1,55	9,81	11,14	0,41	100,00
Sumatera Selatan	2,31	1,97	11,95	9,28	0,58	100,00
Bengkulu	5,67	7,07	4,71	0,27	0,63	100,00
Lampung	3,41	3,75	2,45	1,93	0,80	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,79	1,76	2,00	0,83	0,22	100,00
Kep. Riau	10,45	8,14	0,70	2,02	0,21	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	16,36	8,81	1,47	0,49	0,49	100,00
Jawa Tengah	19,20	5,23	0,73	1,45	0,21	100,00
D I Yogyakarta	8,68	3,24	0,45	15,07	0,18	100,00
Jawa Timur	15,49	3,85	0,74	0,92	0,49	100,00
Banten	8,14	8,83	5,13	1,40	0,75	100,00
Bali	28,13	4,68	2,63	9,68	0,26	100,00
Nusa Tenggara Barat	16,20	2,50	1,63	0,08	0,23	100,00
Nusa Tenggara Timur	32,17	16,73	5,82	3,95	0,40	100,00
Kalimantan Barat	5,88	3,43	28,56	33,88	0,14	100,00
Kalimantan Tengah	2,92	1,47	34,93	11,83	0,25	100,00
Kalimantan Selatan	1,35	1,24	26,00	3,92	0,36	100,00
Kalimantan Timur	3,96	1,91	19,04	12,93	0,28	100,00
Sulawesi Utara	20,22	3,41	0,80	2,49	0,70	100,00
Sulawesi Tengah	19,61	5,46	9,97	1,18	0,50	100,00
Sulawesi Selatan	14,30	4,93	2,21	2,05	0,19	100,00
Sulawesi Tenggara	18,07	5,56	4,36	3,38	0,15	100,00
Gorontalo	6,10	3,16	4,49	0,15	0,64	100,00
Sulawesi Barat	18,67	11,29	9,52	0,80	0,05	100,00
Maluku	23,55	6,19	3,90	3,42	0,01	100,00
Maluku Utara	8,00	1,36	5,90	5,42	0,44	100,00
Papua Barat	9,96	3,99	14,86	18,55	0,14	100,00
Papua	24,84	20,67	22,42	14,33	0,76	100,00
INDONESIA	13,64	5,55	4,93	4,32	0,46	100,00

Tabel L7.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan
Sumber Utama Air Minum, SP2010

Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Air Kemasan	Ledeng Sampai Rumah	Ledeng Eceran	Pompa	Sumur Terlindung	Sumur tak Terlindung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	20,35	7,63	2,31	2,69	38,88	15,02
Sumatera Utara	12,29	18,71	3,26	12,06	27,19	8,47
Sumatera Barat	12,78	17,71	2,41	2,83	31,12	11,71
Riau	23,60	1,80	0,58	4,74	28,97	13,96
Jambi	10,96	14,51	0,75	1,53	34,03	16,92
Sumatera Selatan	9,18	14,17	3,34	1,94	40,21	12,58
Bengkulu	8,07	11,14	0,80	1,38	32,11	32,98
Lampung	7,81	2,97	1,34	2,49	53,27	22,11
Kep. Bangka Belitung	26,03	2,19	0,35	6,04	46,38	14,71
Kep. Riau	50,06	13,18	2,13	0,64	19,83	7,65
DKI Jakarta	50,69	19,60	5,32	18,51	5,51	0,12
Jawa Barat	17,75	8,64	3,10	18,24	31,65	6,65
Jawa Tengah	4,70	12,38	4,30	12,86	42,59	6,30
DI Yogyakarta	12,18	7,51	0,57	7,69	56,56	5,76
Jawa Timur	11,45	11,36	3,70	17,96	36,44	4,55
Banten	31,05	6,33	3,63	23,61	20,32	6,12
Bali	27,07	29,51	1,49	3,12	15,21	1,00
Nusa Tenggara Barat	8,41	10,91	5,84	6,80	46,96	6,01
Nusa Tenggara Timur	1,23	12,04	7,91	0,62	22,58	6,77
Kalimantan Barat	7,19	6,94	1,45	1,25	8,73	5,89
Kalimantan Tengah	9,16	15,17	1,77	11,13	17,40	7,94
Kalimantan Selatan	6,87	24,28	9,62	10,28	13,57	14,07
Kalimantan Timur	25,75	32,95	4,93	3,01	9,05	5,30
Sulawesi Utara	17,14	16,26	6,75	4,19	30,60	7,59
Sulawesi Tengah	7,60	15,40	3,89	12,19	22,28	9,01
Sulawesi Selatan	12,28	15,96	4,39	13,10	28,90	9,30
Sulawesi Tenggara	6,05	14,87	3,87	4,32	35,67	10,53
Gorontalo	5,39	13,12	4,99	4,68	50,13	11,18
Sulawesi Barat	5,25	8,53	2,71	4,83	31,02	14,03
Maluku	3,52	13,49	6,82	4,53	37,32	5,69
Maluku Utara	2,69	22,32	4,80	1,62	41,62	10,34
Papua Barat	19,13	12,63	2,04	2,61	19,41	7,28
Papua	10,17	8,66	1,59	1,03	8,02	5,51
INDONESIA	14,70	12,15	3,55	12,42	32,14	7,64

Tabel L7.3 Lanjutan ...
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi Dan
Sumber Utama Air Minum, SP2010

Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Mata Air Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Sungai	Hujan	Lainnya	Jumlah
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Aceh	4,80	2,66	3,94	1,24	0,49	100,00
Sumatera Utara	7,45	3,55	3,54	2,71	0,77	100,00
Sumatera Barat	8,02	6,14	3,60	3,12	0,56	100,00
Riau	1,10	0,62	2,43	21,85	0,34	100,00
Jambi	1,59	1,17	7,09	11,03	0,41	100,00
Sumatera Selatan	1,63	1,34	8,76	6,40	0,45	100,00
Bengkulu	4,37	5,08	3,32	0,25	0,50	100,00
Lampung	2,96	2,95	1,91	1,47	0,71	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,34	1,02	1,10	0,60	0,25	100,00
Kep. Riau	3,40	1,61	0,21	1,05	0,24	100,00
DKI Jakarta	0,10	0,00	0,00	0,10	0,06	100,00
Jawa Barat	8,72	3,99	0,64	0,19	0,42	100,00
Jawa Tengah	12,11	3,21	0,49	0,86	0,20	100,00
DI Yogyakarta	3,38	1,09	0,15	4,82	0,28	100,00
Jawa Timur	10,79	2,26	0,48	0,62	0,39	100,00
Banten	3,23	3,02	1,72	0,54	0,42	100,00
Bali	15,14	2,12	1,20	3,98	0,16	100,00
Nusa Tenggara Barat	11,84	1,85	1,12	0,05	0,20	100,00
Nusa Tenggara Timur	26,63	13,67	4,76	3,20	0,58	100,00
Kalimantan Barat	4,42	2,48	20,93	40,56	0,14	100,00
Kalimantan Tengah	2,13	1,07	25,38	8,62	0,24	100,00
Kalimantan Selatan	0,86	0,78	17,11	2,32	0,24	100,00
Kalimantan Timur	1,81	0,83	8,49	7,46	0,41	100,00
Sulawesi Utara	12,70	2,26	0,47	1,55	0,49	100,00
Sulawesi Tengah	16,25	4,29	7,72	0,91	0,47	100,00
Sulawesi Selatan	9,59	3,23	1,66	1,42	0,16	100,00
Sulawesi Tenggara	14,25	4,37	3,26	2,66	0,16	100,00
Gorontalo	4,69	2,21	2,98	0,10	0,53	100,00
Sulawesi Barat	15,58	9,09	8,27	0,63	0,04	100,00
Maluku	19,69	3,97	2,58	2,38	0,01	100,00
Maluku Utara	5,99	1,02	4,32	4,91	0,38	100,00
Papua Barat	7,84	2,91	10,63	15,37	0,14	100,00
Papua	19,19	15,78	16,97	12,38	0,71	100,00
INDONESIA	8,44	3,11	2,70	2,77	0,37	100,00

Tabel L8.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan
Fasilitas Buang Air Besar, SP2010

Perkotaan

Provinsi	Jamban Sendiri	Jamban Bersama	Jamban Umum	Tidak Punya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	83,42	7,09	2,66	6,83	100,00
Sumatera Utara	89,53	6,22	0,85	3,41	100,00
Sumatera Barat	73,65	10,43	3,33	12,59	100,00
Riau	92,00	5,65	0,60	1,74	100,00
Jambi	88,19	5,79	1,54	4,49	100,00
Sumatera Selatan	83,54	8,60	2,80	5,06	100,00
Bengkulu	84,75	9,93	1,09	4,23	100,00
Lampung	83,43	8,89	1,86	5,82	100,00
Kep. Bangka Belitung	83,32	3,93	1,57	11,18	100,00
Kep. Riau	85,81	12,08	0,65	1,46	100,00
DKI Jakarta	76,47	18,88	3,86	0,79	100,00
Jawa Barat	76,15	13,26	4,36	6,23	100,00
Jawa Tengah	71,79	11,53	2,59	14,08	100,00
DI Yogyakarta	69,91	23,07	1,01	6,01	100,00
Jawa Timur	71,33	12,96	1,87	13,84	100,00
Banten	77,54	12,71	2,29	7,46	100,00
Bali	74,56	20,30	0,26	4,88	100,00
Nusa Tenggara Barat	51,18	15,94	2,22	30,66	100,00
Nusa Tenggara Timur	73,92	22,21	1,22	2,65	100,00
Kalimantan Barat	87,63	6,89	1,48	4,00	100,00
Kalimantan Tengah	79,92	11,14	4,58	4,36	100,00
Kalimantan Selatan	79,97	11,25	6,01	2,78	100,00
Kalimantan Timur	87,82	7,32	2,34	2,53	100,00
Sulawesi Utara	72,25	20,18	1,77	5,80	100,00
Sulawesi Tengah	73,30	9,81	6,06	10,83	100,00
Sulawesi Selatan	76,02	14,89	2,37	6,72	100,00
Sulawesi Tenggara	72,27	15,56	3,25	8,92	100,00
Gorontalo	54,63	17,37	9,41	18,59	100,00
Sulawesi Barat	60,66	9,45	3,11	26,78	100,00
Maluku	67,69	16,24	4,27	11,80	100,00
Maluku Utara	67,47	22,16	4,83	5,54	100,00
Papua Barat	72,53	22,20	2,25	3,02	100,00
Papua	78,27	13,12	4,60	4,01	100,00
INDONESIA	76,01	12,96	2,83	8,20	100,00

Tabel L8.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan
Fasilitas Buang Air Besar, SP2010

Perdesaan

Provinsi	Jamban Sendiri	Jamban Bersama	Jamban Umum	Tidak Punya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	49,95	6,39	8,16	35,50	100,00
Sumatera Utara	62,08	4,93	5,47	27,51	100,00
Sumatera Barat	43,10	10,44	6,66	39,80	100,00
Riau	77,26	6,24	1,93	14,58	100,00
Jambi	61,08	8,29	4,49	26,14	100,00
Sumatera Selatan	57,68	10,50	5,26	26,56	100,00
Bengkulu	57,97	5,03	2,05	34,94	100,00
Lampung	75,52	8,34	1,16	14,99	100,00
Kep. Bangka Belitung	54,04	2,36	1,98	41,62	100,00
Kep. Riau	68,70	6,00	2,89	22,41	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	100,00
Jawa Barat	53,33	14,88	10,90	20,89	100,00
Jawa Tengah	60,38	10,19	3,22	26,21	100,00
DI Yogyakarta	82,57	10,67	0,48	6,28	100,00
Jawa Timur	54,04	13,29	1,55	31,12	100,00
Banten	36,30	6,36	4,78	52,56	100,00
Bali	56,85	13,96	0,04	29,16	100,00
Nusa Tenggara Barat	34,13	9,64	2,19	54,04	100,00
Nusa Tenggara Timur	60,85	8,17	1,14	29,83	100,00
Kalimantan Barat	51,02	9,49	3,83	35,66	100,00
Kalimantan Tengah	48,94	25,18	7,45	18,43	100,00
Kalimantan Selatan	54,59	16,06	5,83	23,52	100,00
Kalimantan Timur	68,33	10,23	5,39	16,05	100,00
Sulawesi Utara	59,37	9,63	2,84	28,16	100,00
Sulawesi Tengah	42,62	4,34	3,41	49,63	100,00
Sulawesi Selatan	56,36	6,47	1,89	35,27	100,00
Sulawesi Tenggara	50,74	5,11	2,12	42,03	100,00
Gorontalo	22,85	7,62	8,01	61,52	100,00
Sulawesi Barat	39,59	4,83	2,36	53,22	100,00
Maluku	38,91	4,93	8,47	47,70	100,00
Maluku Utara	38,05	5,67	18,78	37,50	100,00
Papua Barat	54,06	14,15	10,30	21,49	100,00
Papua	37,81	11,58	3,42	47,20	100,00
INDONESIA	55,81	10,51	4,34	29,34	100,00

Tabel L8.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan
Fasilitas Buang Air Besar, SP2010

Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Jamban Sendiri	Jamban Bersama	Jamban Umum	Tidak Punya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	59,25	6,58	6,63	27,53	100,00
Sumatera Utara	75,37	5,55	3,23	15,84	100,00
Sumatera Barat	54,74	10,44	5,39	29,44	100,00
Riau	82,93	6,01	1,42	9,64	100,00
Jambi	69,12	7,55	3,61	19,72	100,00
Sumatera Selatan	66,51	9,85	4,42	19,22	100,00
Bengkulu	66,12	6,52	1,76	25,59	100,00
Lampung	77,44	8,47	1,33	12,76	100,00
Kep. Bangka Belitung	68,67	3,14	1,77	26,41	100,00
Kep. Riau	82,98	11,07	1,02	4,93	100,00
DKI Jakarta	76,47	18,88	3,86	0,79	100,00
Jawa Barat	67,92	13,85	6,72	11,52	100,00
Jawa Tengah	65,46	10,79	2,94	20,81	100,00
DI Yogyakarta	73,95	19,11	0,84	6,09	100,00
Jawa Timur	62,05	13,14	1,70	23,12	100,00
Banten	64,55	10,71	3,08	21,66	100,00
Bali	67,65	17,83	0,17	14,35	100,00
Nusa Tenggara Barat	41,23	12,26	2,20	44,30	100,00
Nusa Tenggara Timur	63,38	10,89	1,16	24,58	100,00
Kalimantan Barat	61,82	8,72	3,14	26,32	100,00
Kalimantan Tengah	59,26	20,50	6,49	13,74	100,00
Kalimantan Selatan	65,14	14,06	5,90	14,90	100,00
Kalimantan Timur	80,43	8,42	3,50	7,65	100,00
Sulawesi Utara	65,21	14,42	2,35	18,02	100,00
Sulawesi Tengah	50,06	5,67	4,05	40,22	100,00
Sulawesi Selatan	63,40	9,49	2,06	25,05	100,00
Sulawesi Tenggara	56,65	7,98	2,43	32,94	100,00
Gorontalo	33,78	10,97	8,49	46,76	100,00
Sulawesi Barat	44,24	5,85	2,53	47,38	100,00
Maluku	50,05	9,31	6,84	33,80	100,00
Maluku Utara	46,16	10,22	14,93	28,69	100,00
Papua Barat	59,55	16,54	7,91	16,00	100,00
Papua	48,01	11,96	3,72	36,31	100,00
INDONESIA	65,80	11,72	3,59	18,88	100,00

Tabel L9.1
Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Jamban (Sendiri, Bersama, Umum)
Menurut Provinsi dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, SP2010

Perkotaan

Provinsi	Tangki Septik	Tanpa Tangki Septik	Tidak Punya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	90,55	6,51	2,94	100,00
Sumatera Utara	89,23	7,93	2,84	100,00
Sumatera Barat	81,82	10,52	7,65	100,00
Riau	89,73	7,52	2,75	100,00
Jambi	86,39	9,70	3,91	100,00
Sumatera Selatan	90,06	6,42	3,52	100,00
Bengkulu	84,48	13,30	2,22	100,00
Lampung	87,59	9,24	3,17	100,00
Kep. Bangka Belitung	96,35	2,44	1,21	100,00
Kep. Riau	91,88	4,84	3,27	100,00
DKI Jakarta	92,53	4,47	3,00	100,00
Jawa Barat	74,08	16,64	9,28	100,00
Jawa Tengah	86,17	9,08	4,75	100,00
DI Yogyakarta	95,15	3,51	1,34	100,00
Jawa Timur	87,67	9,06	3,27	100,00
Banten	91,60	5,60	2,79	100,00
Bali	98,09	1,37	0,53	100,00
Nusa Tenggara Barat	89,84	6,70	3,46	100,00
Nusa Tenggara Timur	75,84	21,81	2,34	100,00
Kalimantan Barat	90,27	6,90	2,84	100,00
Kalimantan Tengah	83,56	9,68	6,76	100,00
Kalimantan Selatan	81,15	5,78	13,08	100,00
Kalimantan Timur	89,84	6,52	3,64	100,00
Sulawesi Utara	91,28	6,62	2,10	100,00
Sulawesi Tengah	92,96	4,31	2,73	100,00
Sulawesi Selatan	94,99	3,46	1,55	100,00
Sulawesi Tenggara	94,64	3,70	1,66	100,00
Gorontalo	96,15	2,12	1,73	100,00
Sulawesi Barat	93,36	4,33	2,31	100,00
Maluku	90,66	5,84	3,51	100,00
Maluku Utara	93,61	3,72	2,67	100,00
Papua Barat	88,23	7,03	4,73	100,00
Papua	85,53	9,12	5,35	100,00
INDONESIA	85,57	9,52	4,91	100,00

Tabel L9.2
Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Jamban (Sendiri, Bersama, Umum)
Menurut Provinsi dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, SP2010

Perdesaan

Provinsi	Tangki Septik	Tanpa Tangki Septik	Tidak Punya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	64,56	22,33	13,11	100,00
Sumatera Utara	63,21	25,37	11,42	100,00
Sumatera Barat	57,34	21,88	20,78	100,00
Riau	51,25	34,06	14,69	100,00
Jambi	57,94	27,26	14,80	100,00
Sumatera Selatan	51,44	32,40	16,16	100,00
Bengkulu	55,92	35,20	8,88	100,00
Lampung	47,76	44,21	8,03	100,00
Kep. Bangka Belitung	88,48	8,38	3,14	100,00
Kep. Riau	51,97	20,51	27,51	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	100,00
Jawa Barat	56,58	23,03	20,39	100,00
Jawa Tengah	66,68	24,99	8,33	100,00
DI Yogyakarta	70,78	26,78	2,44	100,00
Jawa Timur	56,73	34,30	8,97	100,00
Banten	70,61	15,31	14,08	100,00
Bali	93,90	4,21	1,89	100,00
Nusa Tenggara Barat	85,56	9,66	4,78	100,00
Nusa Tenggara Timur	33,97	50,21	15,82	100,00
Kalimantan Barat	53,55	24,66	21,79	100,00
Kalimantan Tengah	40,75	28,01	31,24	100,00
Kalimantan Selatan	51,71	26,38	21,91	100,00
Kalimantan Timur	62,09	21,34	16,57	100,00
Sulawesi Utara	83,28	13,21	3,51	100,00
Sulawesi Tengah	77,33	14,77	7,90	100,00
Sulawesi Selatan	78,54	15,81	5,64	100,00
Sulawesi Tenggara	65,76	26,54	7,70	100,00
Gorontalo	88,97	7,20	3,83	100,00
Sulawesi Barat	73,60	19,32	7,08	100,00
Maluku	77,65	12,30	10,05	100,00
Maluku Utara	76,58	9,23	14,19	100,00
Papua Barat	72,05	14,23	13,73	100,00
Papua	25,14	18,71	56,15	100,00
INDONESIA	59,94	27,13	12,94	100,00

Tabel L9.3
Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Jamban (Sendiri, Bersama, Umum)
Menurut Provinsi dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, SP2010

Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Tangki Septik	Tanpa Tangki Septik	Tidak Punya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	73,84	16,68	9,48	100,00
Sumatera Utara	77,67	15,68	6,65	100,00
Sumatera Barat	68,90	16,52	14,58	100,00
Riau	67,39	22,93	9,69	100,00
Jambi	68,00	21,05	10,95	100,00
Sumatera Selatan	66,94	21,97	11,09	100,00
Bengkulu	67,11	26,62	6,27	100,00
Lampung	58,20	35,05	6,75	100,00
Kep. Bangka Belitung	93,23	4,80	1,98	100,00
Kep. Riau	86,49	6,96	6,55	100,00
DKI Jakarta	92,53	4,47	3,00	100,00
Jawa Barat	68,44	18,70	12,86	100,00
Jawa Tengah	76,10	17,30	6,60	100,00
DI Yogyakarta	87,38	10,93	1,69	100,00
Jawa Timur	72,79	21,20	6,01	100,00
Banten	87,60	7,45	4,95	100,00
Bali	96,74	2,29	0,97	100,00
Nusa Tenggara Barat	87,78	8,13	4,09	100,00
Nusa Tenggara Timur	44,42	43,13	12,46	100,00
Kalimantan Barat	67,66	17,84	14,50	100,00
Kalimantan Tengah	56,57	21,24	22,19	100,00
Kalimantan Selatan	65,69	16,60	17,71	100,00
Kalimantan Timur	80,29	11,62	8,09	100,00
Sulawesi Utara	87,45	9,78	2,78	100,00
Sulawesi Tengah	82,98	10,99	6,03	100,00
Sulawesi Selatan	85,87	10,31	3,82	100,00
Sulawesi Tenggara	76,53	18,02	5,45	100,00
Gorontalo	92,74	4,53	2,73	100,00
Sulawesi Barat	79,67	14,71	5,61	100,00
Maluku	84,36	8,97	6,68	100,00
Maluku Utara	82,80	7,22	9,98	100,00
Papua Barat	77,61	11,75	10,64	100,00
Papua	48,16	15,05	36,78	100,00
INDONESIA	74,29	17,27	8,44	100,00

Tabel L10.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Bahan Bakar Masak Utama
Sehari-hari, SP2010

Perkotaan

Provinsi	Listrik	Gas	Minyak Tanah	Arang	Kayu	Lainnya	Tidak Pakai	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	1,23	35,56	52,15	0,03	8,53	0,14	2,37	100,00
Sumatera Utara	1,07	54,59	35,40	0,03	7,56	0,24	1,12	100,00
Sumatera Barat	2,45	21,28	52,64	0,06	22,07	0,24	1,25	100,00
Riau	1,35	30,42	57,91	1,04	7,36	0,13	1,79	100,00
Jambi	0,96	30,45	51,18	3,87	12,40	0,21	0,93	100,00
Sumatera Selatan	0,87	83,84	7,87	0,24	6,36	0,16	0,66	100,00
Bengkulu	1,41	32,70	51,14	0,04	13,58	0,14	0,99	100,00
Lampung	1,04	61,18	11,23	0,21	24,33	0,24	1,76	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,75	45,47	42,66	0,08	9,63	0,13	1,27	100,00
Kep. Riau	1,11	42,51	50,36	0,17	3,08	0,26	2,52	100,00
DKI Jakarta	1,34	83,70	4,72	0,00	0,22	0,44	9,58	100,00
Jawa Barat	1,13	83,40	1,90	0,04	10,79	0,27	2,46	100,00
Jawa Tengah	0,37	72,39	1,84	0,20	22,70	0,10	2,39	100,00
DI Yogyakarta	0,33	58,61	1,75	0,84	24,81	0,49	13,19	100,00
Jawa Timur	0,92	68,17	7,69	0,06	20,60	0,21	2,35	100,00
Banten	1,35	85,21	2,24	0,02	7,68	0,31	3,19	100,00
Bali	1,96	67,79	7,34	0,03	17,20	0,14	5,54	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,57	4,21	55,97	0,05	38,37	0,15	0,68	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,08	1,16	65,80	0,05	31,15	0,22	0,54	100,00
Kalimantan Barat	1,03	55,11	31,04	0,12	11,53	0,19	0,97	100,00
Kalimantan Tengah	1,31	11,74	74,25	0,22	11,86	0,12	0,50	100,00
Kalimantan Selatan	1,80	14,96	71,47	0,07	10,35	0,12	1,24	100,00
Kalimantan Timur	1,10	66,56	25,61	0,18	4,30	0,24	2,00	100,00
Sulawesi Utara	1,85	2,64	81,01	0,05	13,48	0,17	0,80	100,00
Sulawesi Tengah	1,10	6,61	72,02	1,22	18,05	0,27	0,73	100,00
Sulawesi Selatan	1,33	71,45	15,57	0,54	10,21	0,14	0,77	100,00
Sulawesi Tenggara	1,04	9,25	69,24	2,46	17,34	0,14	0,54	100,00
Gorontalo	1,64	1,70	70,77	0,14	25,07	0,17	0,51	100,00
Sulawesi Barat	0,90	18,32	40,58	0,73	38,74	0,13	0,60	100,00
Maluku	0,94	1,21	79,42	0,05	17,22	0,12	1,02	100,00
Maluku Utara	2,19	1,18	78,81	0,02	16,77	0,05	0,97	100,00
Papua Barat	0,84	3,20	86,02	0,12	7,87	0,25	1,71	100,00
Papua	0,56	2,19	84,09	0,12	12,13	0,17	0,74	100,00
INDONESIA	1,05	66,51	15,06	0,17	13,97	0,23	3,02	100,00

Tabel L10.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Bahan Bakar Masak Utama
Sehari-hari, SP2010

Perdesaan

Provinsi	Listrik	Gas	Minyak Tanah	Arang	Kayu	Lainnya	Tidak Pakai	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	1,41	8,80	33,18	0,04	56,29	0,06	0,22	100,00
Sumatera Utara	0,96	23,19	19,44	0,05	56,10	0,11	0,15	100,00
Sumatera Barat	0,73	6,74	19,17	0,05	73,01	0,08	0,21	100,00
Riau	0,47	6,29	39,61	10,74	42,52	0,16	0,19	100,00
Jambi	0,65	12,35	18,96	5,21	62,57	0,06	0,20	100,00
Sumatera Selatan	0,44	39,20	4,45	1,87	53,82	0,10	0,11	100,00
Bengkulu	0,51	6,62	12,70	0,04	79,94	0,05	0,14	100,00
Lampung	0,33	12,97	3,61	0,23	82,74	0,04	0,09	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,74	24,90	31,35	0,59	42,18	0,05	0,20	100,00
Kep. Riau	0,78	6,89	51,05	1,11	39,29	0,22	0,66	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Jawa Barat	0,77	46,58	0,52	0,03	51,58	0,13	0,39	100,00
Jawa Tengah	0,11	34,55	0,33	0,01	64,61	0,08	0,30	100,00
DI Yogyakarta	0,01	18,56	0,18	0,03	80,99	0,04	0,20	100,00
Jawa Timur	0,59	28,29	3,04	0,02	67,59	0,12	0,35	100,00
Banten	0,65	32,43	0,79	0,10	65,66	0,12	0,26	100,00
Bali	0,60	24,03	1,14	0,00	74,00	0,05	0,17	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,23	0,52	21,64	0,05	77,36	0,07	0,15	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,12	0,05	3,82	0,05	95,88	0,05	0,03	100,00
Kalimantan Barat	0,58	13,06	12,32	0,41	73,49	0,07	0,07	100,00
Kalimantan Tengah	0,52	1,50	30,45	0,15	67,12	0,13	0,13	100,00
Kalimantan Selatan	1,29	2,95	25,30	0,04	70,14	0,04	0,25	100,00
Kalimantan Timur	0,47	38,33	18,39	1,28	41,12	0,08	0,33	100,00
Sulawesi Utara	0,50	0,25	23,42	0,56	75,12	0,07	0,07	100,00
Sulawesi Tengah	0,22	0,46	11,48	6,81	80,90	0,04	0,09	100,00
Sulawesi Selatan	0,10	26,86	5,76	2,98	64,19	0,04	0,06	100,00
Sulawesi Tenggara	0,16	1,36	14,29	4,32	79,80	0,03	0,04	100,00
Gorontalo	0,21	0,14	16,15	0,04	83,28	0,06	0,11	100,00
Sulawesi Barat	0,14	3,92	9,12	2,45	84,31	0,02	0,04	100,00
Maluku	0,31	0,11	15,64	0,07	83,64	0,08	0,15	100,00
Maluku Utara	0,02	0,15	11,82	0,16	87,68	0,10	0,07	100,00
Papua Barat	0,39	1,22	36,04	0,12	61,64	0,13	0,46	100,00
Papua	0,05	0,05	8,71	0,35	90,57	0,13	0,14	100,00
INDONESIA	0,50	24,28	8,40	0,81	65,68	0,09	0,24	100,00

Tabel L10.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Bahan Bakar Masak Utama
Sehari-hari, SP2010

Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Listrik	Gas	Minyak Tanah	Arang	Kayu	Lain-nya	Tidak Pakai	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	1,36	16,23	38,45	0,03	43,02	0,08	0,82	100,00
Sumatera Utara	1,01	38,40	27,17	0,04	32,59	0,17	0,62	100,00
Sumatera Barat	1,39	12,29	31,94	0,05	53,58	0,14	0,61	100,00
Riau	0,81	15,60	46,67	7,00	28,95	0,15	0,81	100,00
Jambi	0,74	17,74	28,55	4,81	47,64	0,11	0,42	100,00
Sumatera Selatan	0,59	54,44	5,62	1,31	37,61	0,12	0,30	100,00
Bengkulu	0,79	14,57	24,41	0,04	59,72	0,08	0,40	100,00
Lampung	0,50	24,68	5,46	0,23	68,55	0,08	0,49	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,74	35,18	37,00	0,33	25,92	0,09	0,74	100,00
Kep. Riau	1,06	36,61	50,47	0,32	9,08	0,25	2,21	100,00
DKI Jakarta	1,34	83,70	4,72	0,00	0,22	0,44	9,58	100,00
Jawa Barat	1,00	70,11	1,40	0,04	25,51	0,22	1,71	100,00
Jawa Tengah	0,23	51,41	1,01	0,10	45,94	0,09	1,23	100,00
DI Yogyakarta	0,23	45,81	1,24	0,58	42,76	0,34	9,04	100,00
Jawa Timur	0,75	46,75	5,19	0,04	45,83	0,16	1,28	100,00
Banten	1,13	68,55	1,78	0,05	25,98	0,25	2,26	100,00
Bali	1,43	50,72	4,92	0,02	39,35	0,10	3,45	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,37	2,05	35,94	0,05	61,11	0,10	0,37	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,30	0,27	15,80	0,05	83,37	0,08	0,13	100,00
Kalimantan Barat	0,71	25,46	17,84	0,32	55,22	0,11	0,33	100,00
Kalimantan Tengah	0,78	4,91	45,04	0,17	48,71	0,13	0,26	100,00
Kalimantan Selatan	1,50	7,94	44,49	0,05	45,29	0,07	0,66	100,00
Kalimantan Timur	0,86	55,87	22,87	0,60	18,25	0,18	1,37	100,00
Sulawesi Utara	1,11	1,33	49,53	0,33	47,18	0,12	0,40	100,00
Sulawesi Tengah	0,43	1,95	26,16	5,46	65,67	0,09	0,24	100,00
Sulawesi Selatan	0,54	42,83	9,27	2,11	44,86	0,07	0,32	100,00
Sulawesi Tenggara	0,40	3,53	29,39	3,81	62,64	0,06	0,18	100,00
Gorontalo	0,70	0,67	34,93	0,08	63,27	0,10	0,25	100,00
Sulawesi Barat	0,31	7,10	16,07	2,07	74,25	0,04	0,16	100,00
Maluku	0,55	0,53	40,33	0,06	57,93	0,10	0,49	100,00
Maluku Utara	0,61	0,43	30,29	0,12	68,12	0,09	0,32	100,00
Papua Barat	0,53	1,81	50,93	0,12	45,62	0,16	0,83	100,00
Papua	0,18	0,60	27,89	0,29	70,61	0,14	0,29	100,00
INDONESIA	0,77	45,16	11,69	0,49	40,11	0,16	1,61	100,00

Tabel L11.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan
Penguasaan Telepon, SP2010

Perkotaan

Provinsi	Kabel	Seluler	Kabel dan Seluler	Tidak Punya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,80	79,98	6,86	12,35	100,00
Sumatera Utara	1,40	76,36	9,99	12,25	100,00
Sumatera Barat	1,13	74,66	14,23	9,98	100,00
Riau	0,79	83,70	9,90	5,61	100,00
Jambi	1,06	78,93	10,93	9,07	100,00
Sumatera Selatan	1,49	73,49	12,69	12,33	100,00
Bengkulu	1,05	76,11	13,03	9,82	100,00
Lampung	1,33	72,79	10,57	15,31	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,91	81,77	7,36	9,96	100,00
Kep. Riau	0,90	84,29	11,51	3,30	100,00
DKI Jakarta	1,62	68,80	24,70	4,88	100,00
Jawa Barat	1,15	67,46	13,51	17,87	100,00
Jawa Tengah	1,23	67,92	9,69	21,15	100,00
DI Yogyakarta	0,94	72,86	12,06	14,13	100,00
Jawa Timur	1,58	66,59	12,79	19,04	100,00
Banten	1,20	72,21	14,88	11,71	100,00
Bali	1,14	73,27	16,56	9,03	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,51	60,90	5,47	33,12	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,76	73,06	12,98	13,21	100,00
Kalimantan Barat	1,15	77,12	13,98	7,74	100,00
Kalimantan Tengah	0,86	80,60	11,25	7,29	100,00
Kalimantan Selatan	0,77	79,59	11,54	8,09	100,00
Kalimantan Timur	1,02	79,47	15,75	3,77	100,00
Sulawesi Utara	1,07	71,02	16,10	11,80	100,00
Sulawesi Tengah	0,78	73,94	12,60	12,69	100,00
Sulawesi Selatan	1,31	69,25	18,20	11,23	100,00
Sulawesi Tenggara	0,69	75,83	12,51	10,96	100,00
Gorontalo	0,68	70,25	8,86	20,21	100,00
Sulawesi Barat	0,52	73,59	6,53	19,37	100,00
Maluku	1,33	72,66	11,38	14,63	100,00
Maluku Utara	0,92	81,05	8,35	9,68	100,00
Papua Barat	0,72	81,38	8,87	9,03	100,00
Papua	1,39	75,55	11,71	11,36	100,00
INDONESIA	1,25	70,32	13,43	15,00	100,00

Tabel L11.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan
Penguasaan Telepon, SP2010

Perdesaan

Provinsi	Kabel	Seluler	Kabel dan Seluler	Tidak Punya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,25	61,32	0,69	37,75	100,00
Sumatera Utara	0,26	66,61	0,76	32,38	100,00
Sumatera Barat	0,38	68,21	2,20	29,21	100,00
Riau	0,19	81,99	0,78	17,05	100,00
Jambi	0,30	73,94	1,32	24,44	100,00
Sumatera Selatan	0,34	66,38	1,07	32,21	100,00
Bengkulu	0,21	63,85	0,60	35,33	100,00
Lampung	0,27	64,78	0,88	34,06	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,14	80,36	0,29	19,21	100,00
Kep. Riau	0,16	78,57	0,95	20,31	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	100,00
Jawa Barat	0,23	57,91	1,38	40,48	100,00
Jawa Tengah	0,20	62,05	0,84	36,91	100,00
DI Yogyakarta	0,18	67,38	0,89	31,55	100,00
Jawa Timur	0,39	58,37	1,67	39,56	100,00
Banten	0,21	54,02	0,71	45,06	100,00
Bali	0,44	68,23	1,91	29,42	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,20	49,20	0,59	50,01	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,10	34,57	0,71	64,61	100,00
Kalimantan Barat	0,37	59,73	0,86	39,04	100,00
Kalimantan Tengah	0,23	73,15	0,93	25,70	100,00
Kalimantan Selatan	0,21	74,38	0,60	24,81	100,00
Kalimantan Timur	0,24	82,82	1,45	15,49	100,00
Sulawesi Utara	0,52	60,65	2,81	36,02	100,00
Sulawesi Tengah	0,14	50,47	0,72	48,67	100,00
Sulawesi Selatan	0,29	67,71	1,56	30,44	100,00
Sulawesi Tenggara	0,07	60,09	0,52	39,32	100,00
Gorontalo	0,12	55,21	0,48	44,18	100,00
Sulawesi Barat	0,05	56,17	0,20	43,59	100,00
Maluku	0,45	33,15	0,80	65,60	100,00
Maluku Utara	0,38	37,31	0,50	61,80	100,00
Papua Barat	0,38	48,60	2,49	48,53	100,00
Papua	0,15	13,43	0,24	86,18	100,00
INDONESIA	0,27	60,60	1,14	38,00	100,00

Tabel L11.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan
Penguasaan Telepon, SP2010

Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Kabel	Seluler	Kabel dan Seluler	Tidak Punya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,40	66,50	2,40	30,69	100,00
Sumatera Utara	0,81	71,33	5,23	22,63	100,00
Sumatera Barat	0,67	70,67	6,79	21,88	100,00
Riau	0,42	82,65	4,30	12,63	100,00
Jambi	0,53	75,42	4,18	19,86	100,00
Sumatera Selatan	0,73	68,81	5,04	25,42	100,00
Bengkulu	0,47	67,59	4,39	27,56	100,00
Lampung	0,53	66,73	3,24	29,50	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,53	81,06	3,82	14,59	100,00
Kep. Riau	0,78	83,34	9,76	6,11	100,00
DKI Jakarta	1,62	68,80	24,70	4,88	100,00
Jawa Barat	0,82	64,01	9,13	26,03	100,00
Jawa Tengah	0,66	64,67	4,78	29,89	100,00
D I Yogyakarta	0,70	71,11	8,49	19,70	100,00
Jawa Timur	0,94	62,18	6,82	30,06	100,00
Banten	0,89	66,48	10,42	22,21	100,00
Bali	0,86	71,31	10,85	16,98	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,33	54,07	2,63	42,97	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,23	42,01	3,08	54,68	100,00
Kalimantan Barat	0,60	64,86	4,73	29,81	100,00
Kalimantan Tengah	0,44	75,63	4,37	19,57	100,00
Kalimantan Selatan	0,45	76,54	5,15	17,86	100,00
Kalimantan Timur	0,72	80,74	10,33	8,21	100,00
Sulawesi Utara	0,77	65,35	8,84	25,04	100,00
Sulawesi Tengah	0,29	56,16	3,60	39,95	100,00
Sulawesi Selatan	0,66	68,26	7,52	23,56	100,00
Sulawesi Tenggara	0,24	64,41	3,82	31,53	100,00
Gorontalo	0,31	60,39	3,36	35,94	100,00
Sulawesi Barat	0,15	60,02	1,60	38,24	100,00
Maluku	0,79	48,45	4,89	45,87	100,00
Maluku Utara	0,53	49,37	2,67	47,43	100,00
Papua Barat	0,48	58,37	4,39	36,77	100,00
Papua	0,47	29,24	3,15	67,14	100,00
INDONESIA	0,75	65,41	7,22	26,62	100,00

Tabel L12.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan ART yang Mengakses
Internet dalam 3 Bulan Terakhir, SP2010

Perkotaan

Provinsi	Ada	Tidak Ada	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	21,89	78,11	100,00
Sumatera Utara	19,00	81,00	100,00
Sumatera Barat	32,52	67,48	100,00
Riau	25,18	74,82	100,00
Jambi	26,08	73,92	100,00
Sumatera Selatan	23,43	76,57	100,00
Bengkulu	32,36	67,64	100,00
Lampung	20,17	79,83	100,00
Kep. Bangka Belitung	18,25	81,75	100,00
Kep. Riau	21,78	78,22	100,00
DKI Jakarta	29,98	70,02	100,00
Jawa Barat	20,78	79,22	100,00
Jawa Tengah	19,90	80,10	100,00
DI Yogyakarta	38,90	61,10	100,00
Jawa Timur	20,00	80,00	100,00
Banten	19,86	80,14	100,00
Bali	19,71	80,29	100,00
Nusa Tenggara Barat	14,04	85,96	100,00
Nusa Tenggara Timur	21,75	78,25	100,00
Kalimantan Barat	26,15	73,85	100,00
Kalimantan Tengah	22,55	77,45	100,00
Kalimantan Selatan	30,18	69,82	100,00
Kalimantan Timur	29,13	70,87	100,00
Sulawesi Utara	34,85	65,15	100,00
Sulawesi Tengah	30,94	69,06	100,00
Sulawesi Selatan	33,45	66,55	100,00
Sulawesi Tenggara	29,44	70,56	100,00
Gorontalo	34,45	65,55	100,00
Sulawesi Barat	19,49	80,51	100,00
Maluku	27,35	72,65	100,00
Maluku Utara	21,58	78,42	100,00
Papua Barat	17,47	82,53	100,00
Papua	20,94	79,06	100,00
INDONESIA	22,74	77,26	100,00

Tabel L12.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan ART yang Mengakses
Internet dalam 3 Bulan Terakhir, SP2010

Perdesaan

Provinsi	Ada	Tidak Ada	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	6,61	93,39	100,00
Sumatera Utara	5,54	94,46	100,00
Sumatera Barat	9,91	90,09	100,00
Riau	7,88	92,12	100,00
Jambi	9,61	90,39	100,00
Sumatera Selatan	7,23	92,77	100,00
Bengkulu	7,75	92,25	100,00
Lampung	5,96	94,04	100,00
Kep. Bangka Belitung	7,47	92,53	100,00
Kep. Riau	7,49	92,51	100,00
DKI Jakarta	-	-	100,00
Jawa Barat	7,34	92,66	100,00
Jawa Tengah	8,39	91,61	100,00
DI Yogyakarta	12,18	87,82	100,00
Jawa Timur	7,74	92,26	100,00
Banten	5,46	94,54	100,00
Bali	7,29	92,71	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,77	96,23	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,65	97,35	100,00
Kalimantan Barat	5,86	94,14	100,00
Kalimantan Tengah	7,93	92,07	100,00
Kalimantan Selatan	9,61	90,39	100,00
Kalimantan Timur	10,78	89,22	100,00
Sulawesi Utara	11,73	88,27	100,00
Sulawesi Tengah	5,19	94,81	100,00
Sulawesi Selatan	8,00	92,00	100,00
Sulawesi Tenggara	4,89	95,11	100,00
Gorontalo	7,59	92,41	100,00
Sulawesi Barat	4,19	95,81	100,00
Maluku	4,58	95,42	100,00
Maluku Utara	4,90	95,10	100,00
Papua Barat	9,32	90,68	100,00
Papua	2,58	97,42	100,00
INDONESIA	7,25	92,75	100,00

Tabel L12.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan ART yang Mengakses
Internet dalam 3 Bulan Terakhir, SP2010

Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Ada	Tidak Ada	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	10,86	89,14	100,00
Sumatera Utara	12,06	87,94	100,00
Sumatera Barat	18,53	81,47	100,00
Riau	14,55	85,45	100,00
Jambi	14,51	85,49	100,00
Sumatera Selatan	12,76	87,24	100,00
Bengkulu	15,25	84,75	100,00
Lampung	9,42	90,58	100,00
Kep. Bangka Belitung	12,85	87,15	100,00
Kep. Riau	19,42	80,58	100,00
DKI Jakarta	29,98	70,02	100,00
Jawa Barat	15,93	84,07	100,00
Jawa Tengah	13,52	86,48	100,00
DI Yogyakarta	30,36	69,64	100,00
Jawa Timur	13,42	86,58	100,00
Banten	15,33	84,67	100,00
Bali	14,86	85,14	100,00
Nusa Tenggara Barat	8,05	91,95	100,00
Nusa Tenggara Timur	6,34	93,66	100,00
Kalimantan Barat	11,84	88,16	100,00
Kalimantan Tengah	12,80	87,20	100,00
Kalimantan Selatan	18,15	81,85	100,00
Kalimantan Timur	22,18	77,82	100,00
Sulawesi Utara	22,21	77,79	100,00
Sulawesi Tengah	11,43	88,57	100,00
Sulawesi Selatan	17,12	82,88	100,00
Sulawesi Tenggara	11,63	88,37	100,00
Gorontalo	16,83	83,17	100,00
Sulawesi Barat	7,57	92,43	100,00
Maluku	13,40	86,60	100,00
Maluku Utara	9,50	90,50	100,00
Papua Barat	11,75	88,25	100,00
Papua	7,25	92,75	100,00
INDONESIA	14,91	85,09	100,00

Lampiran Kuesioner SP2010-C1

RAHASIA



REPUBLIK INDONESIA



SENSUS PENDUDUK 2010

PENCACAHAN LENGKAP RUMAH TANGGA DAN PENDUDUK

SP2010-C1

Perhatian:

- Gunakan pensil 2B cap BPS SP2010 untuk mengisi jawaban.
- Hapus sampai bersih jika ingin mengubah jawaban.
- Jaga dokumen agar tetap bersih, kering, serta tidak boleh terlipat.

Set dari setSP2010-C1(LP) lembar

CONTOH PENULISAN ANGKA, MARKING, DAN HURUF YANG BENAR:

PENULISAN ANGKA:

MARKING:

PENULISAN HURUF:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I. PENGENALAN TEMPAT

Prov	Kabi/Kota	Kecamatan	Desa/Kel	No Blok Sensus	No Urut SLS	No Bangunan Fisik	No Bangunan Sensus	No Urut Rumah Tangga
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ALAMAT : <input style="width: 100%;" type="text"/>								

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang biasanya tinggal bersama dalam suatu bangunan serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga.

- Tanyakan siapa saja yang biasa tinggal dan makan di rumah tangga ini, baik dewasa, anak-anak, bayi, atau orang yang sedang bepergian (kurang dari 6 bulan) tapi tidak bermaksud pindah.
- Tuliskan nomor dan nama seluruh anggota rumah tangga pada daftar di bawah ini dimulai dari kepala rumah tangga.

No	SUSUNAN ANGGOTA RUMAH TANGGA		Hubungan dengan kepala rumah tangga*)		Jenis kelamin (beri tanda "✓" pada kolom yang sesuai)	
	Orang yang biasa tinggal		(3)	Laki-laki Perempuan		
	(1)	(2)		(4)	(5)	
001			I			
Jumlah			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nomor urut ART pemberi keterangan utama

Jumlah

Jumlah ART

*Kode hubungan dengan kepala rumah tangga (Kolom 3):

- | | | | |
|------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. Kepala rumah tangga | 2. Istri/suami | 3. Anak kandung | 4. Anak adopsi/tiri |
| 6. Cucu | 7. Orang tua/mertua | 8. Famili lain | 9. Pembantu/sopir/lukang kebun |
| | | | 5. Menantu |
| | | | 0. Lainnya |

TERMASUK ANGGOTA RUMAH TANGGA (tambahkan dalam daftar)

1. Apakah ada bayi atau anak kecil yang belum dicatat?
2. Apakah ada orang lain yang mungkin bukan keluarga seperti pembantu rumah tangga atau orang yang menumpang atau teman, biasa tinggal di rumah tangga ini tetapi belum tercatat?
3. Apakah ada tamu di rumah tangga ini yang sudah meninggalkan rumahnya 6 bulan atau lebih?
4. Apakah ada orang yang biasa tinggal di rumah tangga ini dan sedang bepergian kurang dari 6 bulan?

DIANGGAP BUKAN ANGGOTA RUMAH TANGGA (coret dari daftar)

1. Apakah ada orang yang sudah tercatat tetapi sedang bepergian selama 6 bulan atau lebih?
2. Apakah ada orang yang sudah tercatat tetapi sudah pergi dan berniat pindah?
3. Apakah ada orang yang masih tercatat tetapi sudah meninggal?
4. Apakah ada anak yang sudah tercatat tetapi bekerja/sekolah dan tinggal di tempat lain (misal: kos)?

PEMERIKSAAN KORTIM

Isi tanda (✓) jika sudah diperiksa

1. Apakah penulisan angka, marking, dan huruf sudah benar dan jelas?
2. Apakah pengenalan tempat sudah terisi dengan benar dan jelas?
3. Apakah isian untuk P201–P208 untuk seluruh anggota rumah tangga sudah terisi?
4. Apakah umur P204 untuk seluruh anggota rumah tangga sudah terisi?
5. Apakah untuk anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas (P204 ≥ 5), P209–P214 sudah terisi?
6. Apakah untuk anggota rumah tangga berumur 10 tahun ke atas (P204 ≥ 10), P215–P218 sudah terisi?
7. Apakah ada perempuan pernah kawin berumur 10 tahun ke atas ((P203 = 2), (P215 = 2/3/4), (P204 ≥ 10))? Jika ada, apakah P219–P221 sudah terisi?
8. Apakah ada kematian (P301=1)? Jika ada, apakah P302–P306 sudah terisi?
9. Apakah P306=? Jika ya, apakah P307–P308 sudah terisi?

NAMA PENCACAH

KODE PENCACAH

TANGGAL PENCACAHAN

Nomor seri:

No.Urut ART

II. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA

201. Siapakah nama lengkap ART? (NAMA)

202. Apakah hubungan (NAMA) dengan kepala rumah tangga?
 1. Kepala rumah tangga 6. Cucu
 2. Istri/suami 7. Orang tua/mertua
 3. Anak kandung 8. Familil lain
 4. Anak adopsi/tiri 9. Pembantu/sopir/tk kebun
 5. Menantu 0. Lainnya

203. Apakah jenis kelamin (NAMA)?
 1. Laki-laki 2. Perempuan

204. Pada tanggal, bulan, dan tahun berapa (NAMA) dilahirkan?
 Tanggal Bulan Tahun
 Umur tahun
 Isi marking →
 Penulisan bulan: Januari=01, Februari=02, Maret=03, ..., Desember=12

205. Dimanakah tempat lahir (NAMA)? Diisi Kortim
 a. Prov/Negara*:
 b. Kab/Kota*:

206. Apakah agama (NAMA)?
 1. Islam 5. Budha
 2. Kristen 6. Khonghucu
 3. Katolik 7. Lainnya (tuliskan) _____
 4. Hindu

207. Apakah (NAMA) mempunyai kesulitan:
 1. Tidak 2. Sedikit 3. Parah
 a. Melihat, meskipun pakai kacamata?.....
 b. Mendengar, meskipun memakai alat bantu pendengaran?.....
 c. Berjalan atau naik tangga?.....
 d. Mengingat atau berkonsentrasi atau berkomunikasi dengan orang lain karena kondisi fisik atau mental?.....
 e. Mengurus diri sendiri?.....

208. Apakah kewarganegaraan dan suku bangsa (NAMA)?
 a. WNI, tuliskan suku bangsa Diisi Kortim
 b. WNA, tuliskan kewarganegaraan Diisi Kortim

ANGGOTA RUMAH TANGGA BERUMUR 5 TAHUN KE ATAS

209. Di provinsi dan kab/kota mana (NAMA) bertempat tinggal 5 tahun yang lalu (MEI 2005)? Diisi Kortim
 a. Prov/Negara*:
 b. Kab/Kota*:

210. Apakah bahasa sehari-hari yang digunakan (NAMA) di rumah? Diisi Kortim

211. Apakah (NAMA) mampu berbahasa Indonesia?
 1. Ya 2. Tidak

212. Apakah status sekolah (NAMA)?
 1. Tidak/belum pernah sekolah → ke P214
 2. Masih bersekolah
 3. Tidak bersekolah lagi

213. Apakah ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki (NAMA)?
 1. Tidak/belum tamat SD 6. Tamat Dip I/II
 2. Tamat SD/MI/ sederajat 7. Tamat Dip III/Akademi
 3. Tamat SLTP/MTs/ sederajat 8. Tamat Dip IV/S1
 4. Tamat SLTA/MA/ sederajat 9. Tamat S2/S3
 5. Tamat SM Kejuruan

214. Apakah (NAMA) dapat membaca dan menulis? 1. Ya 2. Tidak
 a. Huruf latin
 b. Huruf lainnya

ANGGOTA RUMAH TANGGA BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS

215. Apakah status perkawinan (NAMA)?
 1. Belum kawin
 2. Kawin
 3. Cerai hidup
 4. Cerai mati

216. Kegiatan (NAMA) seminggu yang lalu:
 a. Apakah bekerja atau berusaha? 1. Ya → ke P217
 2. Tidak
Bekerja atau berusaha ialah melakukan kegiatan untuk memperoleh (membantu memperoleh) upah atau gaji atau laba yang dilakukan paling sedikit 1 jam.
 b. Apakah mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja? 1. Ya → ke P217
 2. Tidak
Seperti menunggu panen, cuti, sakit, dll.
 c. Apakah mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha? 1. Ya → ke P219
 2. Tidak
 d. Apakah bersedia bekerja apabila ada yang menyediakan? 1. Ya } ke P219
 2. Tidak }

217. Apa lapangan usaha atau bidang pekerjaan (utama) dari tempat bekerja (NAMA) selama seminggu yang lalu?
(Tuliskan selengkap-lengkapny, contoh: pertanian tanaman padi, sopir di perusahaan tekstil, sopir di Pemda, guru SMP Negeri, mengojek motor, dokter di Puskesmas, dsb).

Diisi oleh Kortim di lapangan
 01. Pertanian tanaman padi & palawija (jagung, singkong, dll)
 02. Hortikultura (sayur, buah, tanaman hias, tanaman obat, dll)
 03. Perkebunan (tebu, teh, tembakau, karet, sawit, coklat, dll)
 04. Perikanan (penangkapan, budidaya, biota laut, dll)
 05. Peternakan (pembibitan & budidaya ternak besar/kecil, dll)
 06. Kehutanan & pertanian lainnya (perburuan, sagu, rotan, dll)
 07. Pertambangan & penggalian (pasir, emas, batubara, dll)
 08. Industri pengolahan (anyaman, sepatu, pakaian, dll)
 09. Listrik & gas (PLN, Non-PLN, PN Gas, strom aki, dll)
 10. Konstruksi/bangunan (gedung, jembatan, jalan, rumah, dll)
 11. Perdagangan (toko, pedagang keliling, kaki lima, supermarket, dll)
 12. Hotel dan rumah makan (wisma, penginapan, restoran, dll)
 13. Transportasi dan pergudangan (angkutan, ojek, becak, dll)
 14. Informasi & komunikasi (TV, radio, pos, wamnet, wartel, dll)
 15. Keuangan & asuransi (bank, penyedia dana berbadan hukum, dll)
 16. Jasa pendidikan (lembaga pendidikan, kursus, pompes, dll)
 17. Jasa kesehatan (rumah sakit, puskesmas, apotek, dll)
 18. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan & perorangan
 19. Lainnya (real estat, penyedia air, dll)

218. Apakah status atau kedudukan (NAMA) dalam pekerjaan (utama) seminggu yang lalu?
 1. Berusaha sendiri
 2. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh tidak dibayar
 3. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar
 4. Buruh atau karyawan atau pegawai
 5. Pekerja bebas
 6. Pekerja keluarga atau tidak dibayar

PEREMPUAN PERNAH KAWIN BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS

219. Apakah (NAMA) pernah melahirkan anak lahir hidup?
 1. Ya 2. Tidak → ke ART berikutnya

220. Berapakah jumlah anak dari (NAMA) yang:
 Laki-laki Perempuan
 a. Masih hidup dan tinggal di dalam rumah tangga?
 b. Masih hidup dan tinggal di luar rumah tangga?
 c. Telah meninggal dunia?

221. Apakah (NAMA) pernah melahirkan anak lahir hidup sejak 1 Januari 2009?
 1. Ya 2. Tidak

*) Coret salah satu

3

Nomor seri:

III. KEMATIAN			
301. Apakah ada kematian di rumah tangga ini sejak 1 Januari 2009?			
<input type="radio"/> 1. Ya, banyaknya: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 1 orang <input type="radio"/> 2 orang <input type="radio"/> 3 orang <input type="checkbox"/> orang → <i>Tambahkan daftar baru</i> 			
<input type="radio"/> 2. Tidak → ke P401			
<i>Jika lebih dari 3 tulis di sini →</i>			
302. Siapakah nama yang meninggal?			
Almarhum/Almarhumah (ALM.) →
303. Apakah jenis kelamin (ALM.)?	<input type="radio"/> 1. Lk <input type="radio"/> 2. Pr	<input type="radio"/> 1. Lk <input type="radio"/> 2. Pr	<input type="radio"/> 1. Lk <input type="radio"/> 2. Pr
304. Pada bulan dan tahun berapa (ALM.) meninggal?	Bulan Tahun <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2009 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2010	Bulan Tahun <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2009 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2010	Bulan Tahun <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2009 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2010
305. Berapakah umur (ALM.) ketika meninggal?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> tahun	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> tahun	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> tahun
<i>(Isikan "00" jika umur kurang dari 1 tahun. Umur meninggal harus terisi meskipun hanya perkiraan.)</i>			
306. LIHAT P303 dan P305 Apakah yang meninggal perempuan berumur 10 tahun ke atas? Jika "Tidak", lanjutkan ke (ALM.) lain atau P401.	<input type="radio"/> 1. Ya <input type="radio"/> 2. Tidak	<input type="radio"/> 1. Ya <input type="radio"/> 2. Tidak	<input type="radio"/> 1. Ya <input type="radio"/> 2. Tidak
307. Apakah (ALM.) meninggal selama masa kehamilan atau persalinan atau 2 bulan setelah melahirkan?	<input type="radio"/> 1. Ya <input type="radio"/> 2. Tidak	<input type="radio"/> 1. Ya <input type="radio"/> 2. Tidak	<input type="radio"/> 1. Ya <input type="radio"/> 2. Tidak
<i>Jika "Tidak", lanjutkan ke (ALM.) lain atau P401.</i>			
308. Jika P307="ya", Almarhumah meninggal selama:	<input type="radio"/> 1. Masa kehamilan <input type="radio"/> 2. Masa persalinan <input type="radio"/> 3. Masa dua bulan setelah melahirkan	<input type="radio"/> 1. Masa kehamilan <input type="radio"/> 2. Masa persalinan <input type="radio"/> 3. Masa dua bulan setelah melahirkan	<input type="radio"/> 1. Masa kehamilan <input type="radio"/> 2. Masa persalinan <input type="radio"/> 3. Masa dua bulan setelah melahirkan
<i>Lanjutkan ke (ALM.) lain atau P401.</i>			

IV. KETERANGAN PERUMAHAN	
401. Apakah jenis lantai terluas?	406. Apakah fasilitas tempat buang air besar?
<input type="radio"/> 1. Keramik/marmer/granit <input type="radio"/> 2. Ubin/tegel/teraso <input type="radio"/> 3. Semen/bata merah <input type="radio"/> 4. Kayu/papan	<input type="radio"/> 1. Jamban sendiri <input type="radio"/> 2. Jamban bersama <input type="radio"/> 3. Jamban umum <input type="radio"/> 4. Tidak ada → ke P408
402. Berapakah luas lantai tempat tinggal?	407. Apakah tempat akhir pembuangan tinja?
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> m ²	<input type="radio"/> 1. Tangki septik <input type="radio"/> 2. Tanpa tangki septik <input type="radio"/> 3. Tidak punya
403. Apakah sumber penerangan utama?	408. Apakah menguasai telepon?
<input type="radio"/> 1. Listrik PLN meteran <input type="radio"/> 2. Listrik PLN tanpa meteran <input type="radio"/> 3. Listrik Non-PLN <input type="radio"/> 4. Bukan listrik	<input type="radio"/> 1. Kabel <input type="radio"/> 2. Seluler <input type="radio"/> 3. Kabel dan seluler <input type="radio"/> 4. Tidak punya
404. Apakah bahan bakar utama untuk memasak sehari-hari?	409. Apakah ada ART yang terhubung (akses) internet dalam 3 bulan terakhir?
<input type="radio"/> 1. Listrik <input type="radio"/> 2. Gas <input type="radio"/> 3. Minyak tanah <input type="radio"/> 4. Arang	<input type="radio"/> 1. Ya <input type="radio"/> 2. Tidak
405. Apakah sumber utama air minum?	410. Apa status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal ini?
<input type="radio"/> 01. Air kemasan <input type="radio"/> 02. Ledeng sampai rumah <input type="radio"/> 03. Ledeng eceran <input type="radio"/> 04. Pompa <input type="radio"/> 05. Sumur terlindung <input type="radio"/> 06. Sumur tak terlindung <input type="radio"/> 07. Mata air terlindung <input type="radio"/> 08. Mata air tak terlindung <input type="radio"/> 09. Air sungai <input type="radio"/> 10. Air hujan <input type="radio"/> 11. Lainnya	<input type="radio"/> 1. Milik sendiri <input type="radio"/> 2. Sewa <input type="radio"/> 3. Kontrak <input type="radio"/> 4. Lainnya } STOP
	411. Apakah rumah tangga memiliki bukti kepemilikan tanah tempat tinggal ini?
	<input type="radio"/> 1. Ya <input type="radio"/> 2. Tidak → STOP
	412. Apa jenis bukti kepemilikan tanah tempat tinggal?
	<input type="radio"/> 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART <input type="radio"/> 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama ART <input type="radio"/> 3. Sertifikat lain (SHGB, SHP, SSRS) <input type="radio"/> 4. Lainnya (Girik, Akte Jual Beli Notaris/PPAT, dll)

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

ISBN: 978-979-064-309-3

